



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DINAS PERHUBUNGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2026



LAKIP DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan, sekaligus sebagai bentuk komitmen terhadap penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan LKIP ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai selama Tahun 2025, yang diselaraskan dengan perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2025. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam mendukung terwujudnya sistem transportasi yang tertib, aman, lancar, dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhubungan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, LKIP ini tidak hanya memuat capaian kinerja, tetapi juga menguraikan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan sebagai dasar peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna peningkatan kualitas laporan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang.



Akhir kata, kami berharap LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju Manggarai yang maju dan adil dan berdaya saing.

Ruteng, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai



Sahadon Silvester Zaldy, ST, MT

Pembina Utama Muda

Nip. 19671231 199903 1 053



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai	10
1.3. Potensi, Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis	13
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	16
2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025.....	22
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	106



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Strategi Dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026	18
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai.....	19
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021 - 2026	21
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025	22
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025	23
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	24
 Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai	31
Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja 2023-2024-2025	56
Tabel 3. 3 Target Dan Realisasi Kinerja 2023-2024	67
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Dan Indikator Sasaran Strategis Renstra.....	69
Tabel 3. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.....	73
Tabel 3. 6 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	76
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis Tahun 2025	84
Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025.....	88
Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan	92
Tabel 3. 10 Ringkasan Realisasi Menurut Program	104
Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Penganggaran Tahun 2025	105



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
3. Pengukuran Kinerja Perubahan Tahun 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai melaksanakan 3 (tiga) program, yang dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Program-program tersebut terdiri dari dua (2) program strategis bidang perhubungan dan satu (1) program pendukung urusan pemerintahan daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta mendukung konektivitas transportasi darat dan laut di wilayah Kabupaten Manggarai.

Program yang dilaksanakan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Dari aspek pengelolaan keuangan, pagu anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sesuai DPA Perubahan sebesar Rp5.456.904.964,00, dengan realisasi sebesar Rp5.076.620.559,00 atau sekitar 93,03%. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp4.217.443.372,00 dengan realisasi Rp3.856.346.102,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp1.134.761.592,00 dengan realisasi Rp1.116.328.957,00, serta belanja modal sebesar Rp104.700.000,00 dengan realisasi Rp103.945.500,00.

Dari sisi capaian kinerja, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 mencapai 83,39%, dengan kategori Baik, meskipun mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai 85,46%. Sementara itu, rata-rata capaian sasaran penunjang Tahun 2025 sebesar 99,26%, sedikit menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 100,87%, namun tetap menunjukkan kinerja dukungan organisasi yang optimal. Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai 91,33%, berada pada kategori Baik, meskipun menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 93,16%.



Belum optimalnya pencapaian beberapa indikator kinerja pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia teknis perhubungan, khususnya dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan pelayaran; kondisi sarana dan prasarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai; serta dinamika dan perubahan kebijakan serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan akibat keterbatasan anggaran. Selain itu, faktor eksternal seperti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan fluktuasi aktivitas transportasi juga turut mempengaruhi capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain belanja daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai juga mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Daerah. Pada Tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp269.886.952,00 dari target sebesar Rp389.743.775,00 atau sekitar 69,25%, menurun dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar Rp290.076.420,00 dengan target yang sama. Penurunan capaian PAD tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya potensi objek retribusi, keterbatasan sarana pemungutan, serta perubahan pola aktivitas transportasi dan jasa perhubungan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan, dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang tergolong baik. Namun demikian, hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, penguatan koordinasi, serta optimalisasi sumber daya guna meningkatkan pencapaian indikator kinerja dan kualitas pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan di masa mendatang.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan prinsip *good governance*. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pemangku kepentingan.

Kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan LKIP sebagai instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, peningkatan keselamatan lalu lintas, serta penguatan konektivitas transportasi darat dan laut. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja, yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis bidang perhubungan, khususnya dalam pengelolaan lalu lintas, angkutan jalan, dan pelayaran. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang belum



sepenuhnya memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas, turut mempengaruhi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, yang berdampak pada tingkat keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Di samping itu, keterbatasan anggaran daerah serta kebutuhan pembiayaan yang relatif besar untuk pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai juga menghadapi tantangan dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perhubungan, yang dipengaruhi oleh keterbatasan potensi objek retribusi, sarana pemungutan yang belum sepenuhnya berbasis sistem, serta dinamika aktivitas transportasi dan jasa perhubungan. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan urusan perhubungan masih perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menggambarkan secara komprehensif kinerja yang telah dicapai, sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perhubungan. Dengan demikian, LKIP diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan, peningkatan kinerja, serta pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mewujudkan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Manggarai.

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

- Dasar hukum berdirinya organisasi
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai.
- Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 65 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai yang di buat untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 maka tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan



dasar bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Secara rinci Strukur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebagai berikut:



**Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai**



1.3. Potensi, Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

A. Potensi

Potensi dukungan penguatan kinerja pelayanan perhubungan sebagai berikut:

- 1). Dukungan anggaran yang memadai
- 2). Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana transportasi
- 3). Peningkatan jumlah dan mutu SDM bidang perhubungan
- 4). Dukungan kerjasama masyarakat pemerintah dan Lembaga swasta

B. Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis di bidang perhubungan, khususnya pada fungsi pengawasan lalu lintas dan pelayaran.
2. Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai, baik dari aspek kuantitas, kualitas, maupun kondisi pemeliharaan.
3. Belum optimalnya tingkat keselamatan dan ketertiban lalu lintas, yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.
4. Keterbatasan anggaran daerah, yang berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan pengembangan dan pemeliharaan prasarana perhubungan.
5. Optimalisasi PAD sektor perhubungan yang belum maksimal, akibat keterbatasan objek retribusi, sistem pemungutan yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta fluktuasi aktivitas transportasi.
6. Koordinasi lintas sektor yang masih perlu ditingkatkan, baik dengan instansi vertikal maupun perangkat daerah terkait, dalam penyelenggaraan urusan perhubungan.

A. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, isu strategis yang perlu mendapat perhatian Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ke depan meliputi:

1. Peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas sebagai prioritas utama pelayanan publik di bidang perhubungan.
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia perhubungan, melalui peningkatan kompetensi, penataan tugas, dan pemanfaatan teknologi.

3. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perhubungan, melalui perbaikan sistem pemungutan, pendataan potensi, dan peningkatan pengawasan.
5. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi darat dan laut, guna mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, dan terintegrasi.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2024 berpedoman pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyajian disajikan sebagai berikut:

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum perlunya penyusunan laporan kinerja, gambaran umum Perhubungan Kabupaten Manggarai, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 meliputi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahunan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025 dan analisis capaian 2021-2026 serta target dan realisasi anggaran



tahun 2025

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara berkesinambungan. Perencanaan kinerja ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026 serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manggarai. Selain itu, perencanaan kinerja juga memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi di bidang transportasi, kondisi aktual daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Bab ini akan menjelaskan Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Dan uraian sasaran dan target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada Bab ini juga akan disampaikan perbandingan keseluruhan target dan capaian dalam periode RPJMD 2021-2026 untuk dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan pada periode berikutnya.

2.1 Rencana Strategis 2021-2026

Visi Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 adalah “Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing”.

Dan Misi Kepala Daerah adalah :

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kualitas Tatakelola Yang bersih dan melayani.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026 dengan mengacu visi dan misi kepala daerah disusun sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perhubungan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Renstra ini bertujuan untuk mewujudkan infrastruktur transportasi yang merata dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026 disusun sebagai pedoman penyelenggaraan urusan perhubungan yang terarah, terpadu, dan mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan misi Bupati Kabupaten Manggarai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Renstra ini menekankan peran transportasi yang aman, tertib, dan andal sebagai pendorong konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi lokal. Dalam Renstra tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menetapkan tujuan strategis yang berfokus pada peningkatan pelayanan perhubungan yaitu transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mobilitas masyarakat. Sasaran strategis dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat yang antara lain bertujuan meningkatkan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, perpajakan, keselamatan transportasi, serta pengawasan dan pengendalian operasional transportasi. Dengan Renstra 2021–2026 ini, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk menyelaraskan program dan kegiatan dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya peningkatan perekonomian masyarakat melalui transportasi yang aman, lancar, dan terjangkau.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026, dan melaksanakan Misi kedua yaitu: **Meningkatkan Perekonomian Masyarakat**, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai telah menetapkan tujuan yang menjadi target pencapaian Dinas selama periode 2021-2026 sebagai berikut:

Tujuan: Meningkatnya pelayanan Perhubungan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebagaimana tertuang dalam Renstra 2021–2026 merupakan penjabaran dari misi pembangunan daerah di bidang perhubungan. Tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang lebih terukur dan spesifik.



Sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dirumuskan: Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian Masyarakat.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan Indikator Kinerja yang dirancang untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut secara objektif dan terukur.

Untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan menetapkan strategi dan arah kebijakan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Strategi Dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2026

Strategi	Kebijakan
1	2
Peningkatan layanan transportasi umum	Optimalisasi penataan trayek angkutan umum
	Peningkatan jumlah trayek angkutan umum
Optimalisasi pengelolaan parker	Optimalisasi Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
	Peningkatan kapasitas SDM pengelola parkir
	Peningkatan sarana dan prasarana parkir yang memadai
Peningkatan kelaikan angkutan umum	Peningkatan ketersediaan peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi
	Peningkatan kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
Peningkatanketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan dan trotoar
	Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan
Peningkatan upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas
	Peningkatan ketersediaan dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas
	Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
	Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
	Optimalisasi pengelolaan terminal
	Optimalisasi Koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang pelayaran (Pol Air, Sabandar Pelabuhan dan Stakeholder lainnya)
	Peningkatan pengawasan jalur sungai
	Peningkatan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal



Strategi	Kebijakan
1	2
	Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
	Peningkatan kualitas tenaga bidang pelayaran

Secara ringkas tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Peningkatan layanan transportasi umum	Optimalisasi penataan trayek angkutan umum Peningkatan jumlah trayek angkutan umum
		Peningkatan kelaikan angkutan umum	Peningkatan ketersediaan peralatan pengujian kendaraan sesuai standar akreditasi Peningkatan kualifikasi SDM dalam bidang Perhubungan
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan terutama penerangan jalan dan trotoar
			Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan
			Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal
			Optimalisasi pengelolaan terminal
			Optimalisasi Koordinasi dengan mitra kerja dalam bidang pelayaran (Pol Air, Sabandar Pelabuhan dan Stakeholder lainnya)
			Peningkatan pengawasan jalur



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			sungai
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan pengumpan local
			Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat
			Peningkatan kualitas tenaga bidang pelayaran
		Optimalisasi pengelolaan parker	Optimalisasi Penataan dan Pengelolaan Lahan Parkir
			Peningkatan kapasitas SDM pengelola parkir
			Peningkatan sarana dan prasarana parkir yang memadai
		Peningkatan upaya pengendalian volume kendaraan pada ruas rawan kemacetan	Peningkatan ketersediaan dokumen andalalin (analisis dampak lalu lintas); tatralok (tataran transportasi lokal); serta manajemen dan rekayasa lalu lintas
			Peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas

2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ditetapkan sebagai alat ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound), serta diarahkan untuk mengukur hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 IKU Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut:



Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Ka Nomor: 550/203.A /Dishub/Xii/2021

Tentang

Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Tahun 2021-2026

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

Tahun 2021 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	1.1.Rasio Konektivitas	Rasio	<i>Rasio Konektivitas Kab/Kota=(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2xBobot Angkutan sunga,danau dan penyebrangan)</i>	Bid. LLA, Bid. Pengujian dan Bid. Pengelolaan Pelayaran
		1.2 Kinerja Lalulintas	%	Jumlah angkutan darat x100	Bidang LLAJ
				<i>Panjang ruas jalan</i>	



2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Renstra 2021–2026 dan sebagai pedoman operasional dalam pencapaian sasaran strategis.

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan telah menyusun Rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0,86
		Kinerja Lalulitas	Angka	59.37
sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59,3
		Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Perse	100,00
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85,93
		Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40,00
		Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100,00
		Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100,00
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah bidang perhubungan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99,00



NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	3,00
2	Jumlah Pendapatan	Rp	389.743.775

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 merupakan dokumen yang memuat komitmen kinerja Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati Manggarai untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra 2021–2026 serta memperhatikan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.

Perjanjian kinerja Tahun 2025 mencakup sasaran, indikator kinerja, target kinerja, serta program dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan. Dokumen ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 seperti tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0.86
		Kinerja Lalulitas	Angka	59.37
sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74.00
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.50
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3
		Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	100.00
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93
		Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40.00
		Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100,00
		Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100.00
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah bidang perhubungan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99.00



NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	3.00
2	Jumlah Pendapatan	Rp	389.743.775

Program dan Anggaran :

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.091.953.554	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	918.468.528	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	63.292.696	APBD
	Total	6.073.714.778	APBD

Dengan adanya perubahan anggaran pada Tahun 2025, Dinas Perhubungan melakukan revisi Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0.86
		Kinerja Lalulitas	Angka	59.37
sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74.00
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.50
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3
		Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	100.00
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93
		Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40.00
		Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100,00
		Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100.00
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah bidang perhubungan	Persentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99.00



NO	URAIAN	SATUAN	TARGET
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	3.00
2	Jumlah Pendapatan	Rp	389.743.775

Program Dan Anggaran:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.611.802.560	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	790.514.708	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	54.587.696	APBD
	Total	5.456.904.964	APBD

Rincian Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 sesuai APBD Perubahan adalah:

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	790,514,708.00
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,530,000.00
		1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dan Penetapan Jaringan Angkutan Kabupaten /Kota	6,530,000.00
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,420,000.00
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,900,000.00
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137,900,000.00
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0.00
		4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,620,000.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	477,515,272.00
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	477,515,272.00
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	6,165,000.00
		1. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	6,165,000.00
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,250,000.00
		1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	12,000,000.00
		2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,250,000.00
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	13,300,000.00
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	9,400,000.00
		2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,900,000.00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
		1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	106,334,436.00
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106,334,436.00

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696.00
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	31,502,696.00
		1. b Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	31,502,696.00
		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00
		1. b Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00
		TOTAL REALISASI PROGRAM STRATEGIS (2 PROGRAM)	845,102,404.00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,611,802,560.00
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153,166,688.00
		1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,158,088.00
		2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	613,600.00
		3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700,000.00
		4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700,000.00
		5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	700,000.00
		6 b Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800,000.00
		7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,495,000.00
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,246,893,372.00
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,217,443,372.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,450,000.00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,142,500.00
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	810,000.00
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,446,000.00
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,800,000.00
		4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,026,500.00
		5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	7,060,000.00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,900,000.00
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,900,000.00
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,700,000.00
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,700,000.00
		2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,100,000.00
		3 Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,900,000.00
		TOTAL REALISASI PROGRAM (3 PROGRAM)	5,456,904,964.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Manggarai sebagaimana tertuang dalam RPJMD, serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2021–2026.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra, di mana pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2021–2026 dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang digunakan bersifat terukur, relevan, dan menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan perhubungan.

Pencapaian sasaran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai diukur melalui rumus perhitungan:

1. Rumus perhitungan maksimum artinya apabila realisasi capaian semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin tinggi

Dengan rumus: $\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

2. Rumus perhitungan minimum artinya apabila realisasi capaian semakin tinggi, menunjukkan kinerja semakin menurun

Dengan rumus: $\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
--------------------------	---------------------	--------------



$x > 100\%$	ISTIMEWA	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.</i>
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	<i>Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.</i>
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	<i>Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.</i>
$x \leq 60\%$	KURANG	<i>Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.</i>

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan, secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang **baik** dengan rata-rata capaian kinerja 91.33%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program, antara lain:

- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
- Program pengelolaan pelayaran;
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kondisi sarana dan prasarana transportasi serta faktor eksternal lainnya.

Pada tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mencatat capaian kinerja yang tetap berada pada kategori **Baik**, meskipun terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2025 mencapai **83,39%**, menurun dari capaian tahun 2024 yang sebesar **85,46%**. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian sasaran strategis, namun kinerja masih tetap tergolong baik.

Sementara itu, rata-rata capaian sasaran penunjang pada tahun 2025 tercatat sebesar **99,26%**, mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai **100,87%**, namun masih masuk dalam kategori **Baik**. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung di Dinas Perhubungan tetap optimal dan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja keseluruhan.



Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada tahun 2025 adalah **91,33%**, sedikit menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar **93,16%**, namun tetap mempertahankan kategori **Baik**. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Dinas Perhubungan berhasil mempertahankan kinerja yang efektif dan berorientasi pada pencapaian tujuan strategis.

Penurunan capaian pada beberapa indikator menjadi perhatian penting untuk evaluasi dan perbaikan pada tahun-tahun mendatang, guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan optimalisasi fungsi Dinas Perhubungan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.

Capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 adalah seperti pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
Tujuan	Meningkat pelayanan perhubungan	Rasio konektivitas	Angka	0.86	0.73
		Kinerja Lalulitas	Angka	59.37	31.98
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	100.00
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	58.33
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	59.20
		Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	100	66.67
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	33.02



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
		Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	76.62
		Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	20
		Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	48.84
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah bidang perhubungan	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99	98.27

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	Jumlah Inovasi	Inovasi	3	3
2	Jumlah Pendapatan	Rp	389,743,775	269,886,952

PROGRAM STRATEGIS

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI	KET
1	Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	790,514,708	782,669,730	99.01	APBD P
2	Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696	54,010,206	98.94	APBD P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI
	TOTAL PROGRAM STRATEGIS (2) + ANGGARAN	845,102,404	836,679,936	99.00	APBD P
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,611,802,560	4,239,940,623	91.94	APBD P
	TOTAL PROGRAM STRATEGIS (2) + PROGRAM PENUNJANG (1)	5,456,904,964	5,076,620,559	93.03	

Program/Kegiatan dan Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	790,514,708.00	782,669,730.00	99.01
		Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62
		1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten /Kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62
		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,420,000.00	156,541,500.00	97.58
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan	17,900,000.00	17,883,000.00	99.91



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
		2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137,900,000.00	134,078,500.00	97.23
		3. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	#DIV/0!
		4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,620,000.00	4,580,000.00	99.13
		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97
		1. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97
		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,250,000.00	19,920,000.00	98.37
		1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	12,000,000.00	11,860,000.00	98.83
		2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,250,000.00	8,060,000.00	97.70
		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	13,300,000.00	13,300,000.00	100.00
		1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Kabupaten / Kota			
		2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			#DIV/0!
		1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			#DIV/0!
		1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)			
		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47
		1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47
		Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696.00	54,010,206.00	98.9



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20
		1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20
		Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96
		1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96
	TOTAL REALISASI PROGRAM STRATEGIS (2 PROGRAM)		845,102,404.00	836,679,936.00	99.00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,611,802,560.00	4,239,940,623.00	91.94
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	153,166,688.00	150,234,198.00	98.09



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Perangkat Daerah			
		1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,158,088.00	96,490,598.00	99.31
		2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	613,600.00	613,600.00	100.00
		3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00
		4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00
		5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00
		6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800,000.00	400,000.00	50.00
		7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,495,000.00	50,630,000.00	96.45
		Kegiatan Administrasi	4,246,893,372.00	3,882,796,100.00	91.43



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Keuangan Perangkat Daerah		02.00	
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,217,443,372.00	3,856.346.102.00	91.44
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,450,000.00	26,450,000.00	89.81
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	#DIV/0!
		1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	#DIV/0!
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,142,500.00	118,999,300.00	99.88
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	810,000.00	810,000.00	100.00
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,446,000.00	80,437,000.00	99.99
		3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,800,000.00	22,725,000.00	99.67
		4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	8,026,500.00	7,967,300.00	99.26



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
		Penggandaan			
		5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	7,060,000.00	7,060,000.00	100.00
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,900,000.00	22,864,081.00	91.82
		1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
		2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,900,000.00	21,864,081.00	91.48
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,700,000.00	65,046,942.00	96.08
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,700,000.00	52,646,942.00	96.25
		2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,100,000.00	1,500,000.00	71.43
		3 Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,900,000.00	10,900,000.00	100.00



NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan
TOTAL REALISASI PROGRAM (3 PROGRAM)			5,456,904,964.00	5,076,620.5 59.00	93.03

A. Perbandingan Target 2025 dan Realisasi Kinerja 2025

Realisasi kinerja tujuan Tahun 2025, yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja 1 : Rasio Konektivitas

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tujuan	Meningkat pelayanan perhubungan	Rasio konektivitas	Angka	0.86	0.73	84.88

Pada Tahun 2025, Rasio Konektivitas ditetapkan dengan target sebesar **0,86** sebagai indikator untuk mengukur tingkat keterhubungan antarwilayah melalui ketersediaan dan fungsi jaringan prasarana serta layanan perhubungan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Rasio Konektivitas yang dicapai sebesar **0,73**, atau setara dengan **84,88 persen** dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat konektivitas wilayah pada Tahun 2025 berada pada kategori **cukup**, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan keterhubungan wilayah telah berjalan, namun masih terdapat sejumlah wilayah yang belum terlayani secara optimal oleh jaringan transportasi yang memadai.

Belum tercapainya target Rasio Konektivitas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan prasarana perhubungan, kondisi geografis wilayah yang relatif sulit dijangkau, serta belum optimalnya peningkatan kualitas dan jangkauan layanan transportasi pada beberapa koridor penghubung antarwilayah.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan telah melakukan langkah-langkah strategis berupa penetapan skala prioritas pembangunan prasarana perhubungan, optimalisasi pemeliharaan infrastruktur yang telah ada, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasio konektivitas pada tahun-tahun berikutnya dan mendukung pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah.



Rasio konektivitas transportasi darat adalah prosentase jumlah trayek yang dilayani terhadap jumlah kebutuhan trayek pada wilayah kabupaten.

Rasio konektivitas transportasi laut adalah perbandingan prosentase jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah kabupaten.

Rasio Konektivitas dapat dirumuskan :

Rasio Konektivitas : $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Angkutan sungai, danau dan penyebrangan})$

$$\begin{aligned}\text{Rasio Konektivitas} &= (0,91667 \times 70\%) + (0,30 \times 30\%) \\ &= 0,6416 + 0,09 \\ &= 0,7406\end{aligned}$$

IK1 : (angkutan jalan) = Jumlah trayek yang dilayani pada Kab/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kab/Kota tersebut

Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten = 66

Jumlah Kebutuhan trayek pada Kabupaten = 72

Bobot trayek = 1

$$IK1 = \frac{66 \times 1}{72} = 0,916667$$

IK2: (Angkutan sungai, danau dan penyebrangan) = jumlah lintas penyebrangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyebrangan pada Kab/Kota tersebut).

Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada wilayah kabupaten (tidak termasuk sungai dan danau) = 14

Jumlah Kebutuhan lintas penyeberangan pada wilayah Kabupaten = 23

Bobot lintas = 0

$$IK2 = \frac{14 \times 0,5}{23} = 0,30$$

Bobot Angkutan Jalan = 70%

Bobot Angkutan SDP = 30%

Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot=1

Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8

Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5

b. Indikator Kinerja 2 : Kinerja Lalu Lintas

LAKIP DINAS PEHUBUNGAN TAHUN 2025



NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	A					
Tujuan	Meningkat pelayanan perhubungan	Kinerja Lalu Lintas	Angka	59.37	31.98	53.86

Pada tahun 2025, capaian kinerja **lalu lintas** menunjukkan hasil yang **belum mencapai target yang telah ditetapkan**. Dari target kinerja sebesar **59,37**, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar **31,98**. Hal ini menunjukkan adanya selisih yang cukup signifikan antara target dan realisasi, sehingga kinerja lalu lintas pada tahun tersebut belum optimal.

Rendahnya capaian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jumlah kendaraan yang terus meningkat, keterbatasan kapasitas dan kondisi infrastruktur yang cenderung statis, serta adanya kendala operasional dan eksternal yang memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan dan program manajemen lalu lintas yang belum maksimal juga turut berkontribusi terhadap belum tercapainya target. Meskipun demikian, realisasi kinerja lalu lintas sebesar 31,98 tetap mencerminkan adanya aktivitas dan upaya pengelolaan lalu lintas yang berjalan. Ke depan, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terfokus, seperti penguatan manajemen lalu lintas, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi pendukung, agar kinerja lalu lintas dapat ditingkatkan dan target yang ditetapkan pada periode berikutnya dapat dicapai secara lebih optimal.

Rumus :

Kinerja Lalu Lintas, adalah perbandingan jumlah angkutan darat terhadap panjang ruas jalan, dengan **target 59,37 dan realisasi 31,98**, dengan prosentase capaian 53,86.

Atau dirumuskan :

Kinerja Lalu Lintas=
$$\frac{\text{Jumlah Angkutan Darat}}{\text{Panjang ruas jalan}} \times 100\%$$
$$\text{Kinerja Lalu Lintas} = \frac{63.670}{1991,02} \times 100\% = 31.98$$

Jumlah Angkutan Darat = 63.670 unit
Panjang ruas jalan = 1991,02 km (data 2025 Dinas PUPR)



Pencapaian kinerja sasaran strategis

Sasaran Strategis: Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Guna Mendukung Perekonomian Masyarakat

Sasaran strategis *“Meningkatnya pelayanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat”* merupakan fokus utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Sasaran strategis ini diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja, yang mencerminkan kinerja pelayanan perhubungan darat, lalu lintas dan angkutan jalan, serta dukungan terhadap keselamatan dan kelancaran transportasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2025, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 90,08%, yang mencakup kontribusi dari program strategis maupun program penunjang. Persentase capaian yang tinggi ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan telah berhasil menjalankan sebagian besar kegiatan prioritas dengan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan perhubungan di Kabupaten Manggarai.

Capaian rata-rata 90,08% menunjukkan bahwa program strategis dan penunjang telah saling bersinergi, sehingga sasaran strategis tercapai dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung kelancaran transportasi dan perekonomian lokal.

Meski capaian ini tergolong tinggi, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai tetap menekankan perbaikan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis ke depan antara lain: penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana di seluruh wilayah kabupaten.

Dengan pencapaian ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai menunjukkan kinerja yang efektif dan konsisten, sekaligus memperkuat kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perhubungan yang lebih aman, tertib, dan lancar.

Sasaran : Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian Masyarakat yang diukur melalui 8 (delapan) indikator adalah:

1. Indikator Kinerja 1 : Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	100.00	135.14



Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak adalah perbandingan jumlah kecamatan_atau kampung yang terlayani angkutan umum layak terhadap jumlah total kecamatan atau kampung, dari realisasi 100% dari target 74% dan prosentase capaian sebesar 135.14%. Atau dirumuskan :

Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak =
Jumlah kecamatan atau kampung yang terlayani angkutan umum layak x 100
Jumlah total kecamatan atau kampung
= 12/12 x 100% = 100%

Jumlah kecamatan yang terlayani Angkutan Umum= 12; Jumlah kecamatan= 12

Salah satu fokus Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 adalah peningkatan cakupan angkutan umum layak guna mendukung mobilitas masyarakat secara aman, nyaman, dan terjangkau. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan perhubungan yang berkualitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui kelancaran mobilitas orang dan barang.

Pada Tahun 2025, target cakupan angkutan umum layak ditetapkan sebesar 74, sementara realisasi capaian mencapai 100. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini melebihi target yang ditetapkan, menunjukkan peningkatan layanan transportasi umum yang signifikan dan keberhasilan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan program prioritas pada bidang jumlah layanan trayek angkutan umum yang tersebar pada 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Manggarai.

Tahun 2025 pencapaian kinerja ini didukung dengan anggaran sebesar Rp.6.530.000,- dan terealisasi Rp.6.440.000,- atau terserap 98.62%, yang dianggarkan untuk Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Program Pelayaran, Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	58.33	66.67



Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar adalah perbandingan jumlah sarana prasarana uji KIR sesuai standar terhadap jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia pada kabupaten atau dirumuskan :

Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar

= Jumlah sarana prasarana uji KIR Yang tersedia X 100%

Jumlah sarana prasarana uji KIR sesuai standar

= Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar = $7/12 \times 100\% = 66.67\%$

Jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia= 7

Jumlah sarana prasarana uji KIR sesuai standar = 12

Salah satu fokus Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 adalah peningkatan sarana dan prasarana uji KIR untuk memastikan armada angkutan barang dan penumpang beroperasi sesuai standar keselamatan dan teknis yang berlaku. Indikator ini menjadi tolok ukur kesiapan fasilitas uji KIR dalam mendukung keselamatan transportasi dan perlindungan pengguna jalan.

Pada Tahun 2025, target persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar ditetapkan sebesar 87,5, namun realisasi capaian yang berhasil dicapai adalah sebesar 58,33. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target mencapai 66,67%.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian sarana dan prasarana uji KIR telah tersedia dan beroperasi, pencapaian masih berada di bawah target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan anggaran, dan kebutuhan perawatan serta pembaruan peralatan uji KIR agar memenuhi standar teknis yang berlaku. Kondisi ini menjadi fokus perbaikan Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ke depan.

Upaya perbaikan meliputi peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana uji KIR, optimalisasi pemeliharaan peralatan, dan peningkatan kapasitas SDM pengelola uji KIR. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian indikator ini dapat meningkat signifikan, mendukung keselamatan transportasi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta pelaku angkutan.

Capaian sarana prasarana uji diawali dengan pengadaan sarana prasarana uji sebanyak 6 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana uji KIR guna menjaga optimalisasi fungsi dan kelaikan operasional peralatan yang telah tersedia. Selanjutnya, pada tahun 2025 dilakukan pengadaan 1 (satu) unit sarana uji KIR, sehingga total sarana uji KIR yang dimiliki menjadi 7 (tujuh) unit dari kebutuhan ideal sebanyak 12 (dua belas) unit.

Pada tahun 2025 juga dilakukan Up Grade SIM PKB. Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses pengujian agar lebih tertib, akurat dan terintegrasi.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.420.000,- dan terealisasi Rp 156.541.500,- (97.58%) yaitu pada kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Bidang Pengujian dan Keselamatan Berlalu Lintas.

3. Indikator Kinerja 3 : Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	59.20	99.83

Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik adalah perbandingan jumlah perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik terhadap jumlah total perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan yang tersedia di kabupaten.

Dengan rumus :

Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik = Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik x 100%

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah total perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan} \\ &= 962/1625 \times 100\% = 59,20\% \end{aligned}$$

Salah satu fokus Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 adalah peningkatan kondisi perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan, termasuk rambu, marka jalan, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas lainnya. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 59,30, sementara realisasi capaian yang berhasil dicapai adalah 59,20, yaitu tersedianya perlengkapan jalan baik 962 unit dari total 1625 unit peerengkapan jalan sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 99,83%. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan berhasil hampir sepenuhnya



mencapai target yang ditetapkan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan jalan serta fasilitas keselamatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.300.000,- dan terealisasi Rp 13.300.500.- (100%) yaitu pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota.

4. Indikator Kinerja 4 : Presentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian Masyarakat	Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	100	66.67	66.67

Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik adalah perbandingan jumlah terminal yang dalam kondisi baik (kewenangan kabupaten) terhadap jumlah terminal yang ada di kabupaten (kewenangan kabupaten).

Atau dirumuskan :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase terminal sesuai Standar/dalam kondisi baik dalam kondisi baik} \\ &= \frac{\text{Jumlah terminal kondisi baik}}{\text{Jumlah terminal yang tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{3} \times 100\% = 66,67\% \end{aligned}$$

Jumlah terminal dalam kondisi baik = 2 unit
Jumlah terminal yang tersedia = 3 unit

Pada Tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100%, mencakup 3 terminal utama di Kabupaten Manggarai. Dari realisasi lapangan, 2 terminal telah berada dalam kondisi baik dan sesuai standar, sehingga realisasi capaian mencapai 66,67%..

Capaian ini mencerminkan perlunya upaya perbaikan dan pemeliharaan berkelanjutan, termasuk peningkatan fasilitas terminal, penataan sarana pendukung, dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh terminal dapat segera memenuhi standar 100% dan memberikan kontribusi optimal terhadap kelancaran transportasi, keselamatan penumpang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pada tahun 2025 kegiatan fisik pemeliharaan terminal tidak mendapat alokasi anggaran. Pencapaian indicator ini hanya melalui kegiatan operasional terminal yaitu

pada kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan pagu Rp.106.334.436,- dengan realisasi Rp.105.766.946,- (99.47%).

5. Indikator Kinerja 5 : Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	33.02	38.43

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator *Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai* pada periode 2025 menunjukkan realisasi sebesar 33,02 dari target yang ditetapkan sebesar 85,93, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 38,43%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penataan kawasan parkir dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai masih belum optimal dan belum sepenuhnya memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini diperoleh dengan rumus:

Persentase kawasan parkir tertata
= Jumlah Sarana Dan Prasarana Parkir Sesuai Standar X 100%
Jumlah Sarana Dan Prasarana Parkir
= 1739.1/5366.80 x 100%
=33.02

Luas kawasan parkir tertata =1739,1 m2

Luas kawasan parkir = 5366,80 m2

Pada tahun 2025, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana parkir tidak mendapat alokasi anggaran sehingga tidak dilakukan kegiatan peningkatan maupun pengembangan. Namun demikian, capaian kinerja tetap dapat dipertahankan dan tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh kondisi sarana prasarana parkir yang masih layak pakai serta pemanfaatan yang optimal. Pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan pagu Rp. 477.515.272,- dengan realisasi Rp. 474.661.284,- (99.40%).



6. Indikator Kinerja 6 : Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	76.62	191.56

Indikator *Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa* digunakan untuk mengukur tingkat kebutuhan penanganan kemacetan melalui penerapan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan yang teridentifikasi rawan macet. Indikator ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan penetapan prioritas penanganan kemacetan oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa diperoleh melalui rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa} &= \\
 &\frac{\text{ruas jalan rawan kemacetan yang direkayasa}}{\text{Jumlah total ruas jalan rawan kemacetan}} \times 100\% \\
 &= 3850/1900 \times 100\%=49.50\%
 \end{aligned}$$

Karena menggunakan rumus perhitungan minimum maka untuk mengukur prosentase capaian kinerja Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa *digunakan rumus :*

$$\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
 \text{Panjang jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa} &= 3850 \text{ m} \\
 \text{Panjang jalan rawan kemacetan} &= 1900 \text{ m} \\
 \text{Realisasi rawan macet} &= 49.30\%
 \end{aligned}$$

Maka Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa adalah :

$$\begin{aligned}
 &\frac{40- (49.50-40)}{40} \times 100 =76.62\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, total panjang ruas jalan yang teridentifikasi rawan kemacetan adalah 3.850 meter, sedangkan panjang ruas jalan yang dinilai perlu dilakukan rekayasa lalu lintas sebesar 1.900 meter. Dengan demikian, diperoleh capaian indikator sebesar 76,42%, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 40%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa persentase ruas jalan rawan kemacetan yang memerlukan rekayasa lalu lintas melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penanganan kemacetan pada ruas-ruas jalan prioritas cukup tinggi, seiring dengan meningkatnya volume kendaraan, aktivitas lalu lintas perkotaan, serta keterbatasan kapasitas jalan di beberapa lokasi strategis.

Capaian yang melebihi target ini juga mencerminkan semakin teridentifikasinya ruas jalan yang membutuhkan penanganan melalui rekayasa lalu lintas, baik berupa pengaturan arus lalu lintas, perubahan manajemen persimpangan, pemasangan rambu dan marka, maupun penerapan rekayasa lalu lintas lainnya. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Perhubungan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program rekayasa lalu lintas secara bertahap.

Beberapa Langkah yang akan dilakuakn untuk mengatasi kemacetan Lalu Lintas di Kota Ruteng

1). Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas

Melakukan pengaturan arus lalu lintas melalui:

- Penerapan **sistem satu arah** pada ruas jalan tertentu yang memiliki volume kendaraan tinggi
- Pengaturan jam operasional kendaraan tertentu (misalnya kendaraan besar tidak masuk jam sibuk)
- Penataan simpang dan pengurangan titik konflik lalu lintas

Langkah ini relatif cepat dan biaya rendah, tapi dampaknya cukup signifikan.

2). Penataan dan Penegakan Parkir

Kemacetan di Ruteng banyak dipicu oleh parkir di badan jalan, terutama di sekitar:

- Pasar Inpres Ruteng
- Pertokoan dan perkantoran
- Sekolah dan fasilitas umum

Upaya yang dilakukan:

- Penetapan **zona parkir resmi**
- Larangan parkir di ruas jalan utama
- Penertiban parkir bersama aparat terkait
- Penyediaan kantong parkir alternatif



3). Penataan Aktivitas Pusat Keramaian

Mengurangi penumpukan kendaraan dengan:

- Penataan akses keluar–masuk pasar dan pertokoan
- Pengaturan waktu bongkar muat barang
- Pengendalian pedagang kaki lima yang mengganggu badan jalan

Ini perlu koordinasi lintas OPD, bukan Dishub saja.

4). Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Meliputi:

- Rambu lalu lintas
- Marka jalan
- Zebra cross dan fasilitas pejalan kaki

Perlengkapan jalan yang jelas membantu kelancaran arus dan disiplin pengguna jalan.

5). Pemanfaatan Data dan Evaluasi Lalu Lintas

Melakukan survei volume lalu lintas dan titik rawan macet secara berkala untuk:

- Menentukan prioritas penanganan
- Mengevaluasi efektivitas rekayasa lalu lintas
- Menyesuaikan kebijakan secara dinamis

6). Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan disiplin berlalu lintas melalui sosialisasi keselamatan dan ketertiban lalu lintas dan tertib parkir; Sebab perubahan perilaku masyarakat adalah kunci jangka panjang.

7). Penguatan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Penanganan kemacetan membutuhkan sinergi antara:

- Dinas Perhubungan
- Kepolisian
- Satpol PP
- Pemerintah Kecamatan/Kelurahan

Penegakan aturan secara konsisten akan memberi efek jera dan menjaga keberlanjutan kebijakan.

Untuk mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.250.000,- dan terealisasi Rp 19.920.000.- (98.37%) yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

7. Indikator Kinerja 7 : Persentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	20	20.00

Indikator *Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik* digunakan untuk mengukur tingkat kelaikan sarana dan prasarana pelabuhan dalam mendukung kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan transportasi laut bagi masyarakat.

Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik adalah perbandingan jumlah pelabuhan dengan fasiitas baik terhadap jumlah pelabuhan yang beroperasi di kabupaten dengan target 100% dan realisasi 20%.

Atau dirumuskan :

$$\begin{aligned}
 &\textit{Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik} \\
 &= \frac{\textit{Jumlah pelabuhan dengan fasilitas baik}}{\textit{Jumlah pelabuhan}} \times 100\% = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%
 \end{aligned}$$

Jumlah pelabuhan kondisi baik = 1 unit; Jumlah Pelabuhan = 5 unit
 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, target indikator pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, yang setara dengan 5 (lima) fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat berada dalam kondisi baik. Dari lima pelabuhan yang ada, realisasi yang dicapai baru satu pelabuhan, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 20%.

Capaian yang masih rendah ini disebabkan oleh kondisi fisik sebagian besar fasilitas pelabuhan pengumpan yang memerlukan perbaikan atau rehabilitasi. Selain itu, keterbatasan alokasi anggaran untuk pemeliharaan, serta perlunya koordinasi dengan instansi terkait, turut mempengaruhi pencapaian indikator ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat belum memenuhi standar kelaikan yang ditetapkan. Tahun 2025, tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan fisik, seperti pemeliharaan atau perbaikan fasilitas. Kegiatan yang dilaksanakan hanya terbatas pada pengawasan serta pengurusan

sertifikat tanah untuk dermaga Rebeng, sehingga belum berdampak langsung pada kondisi fisik fasilitas.

Meskipun demikian, capaian pada satu pelabuhan menjadi dasar awal untuk perencanaan peningkatan kondisi fasilitas di pelabuhan lain. Ke depan, Dinas Perhubungan berencana melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi bertahap, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan perencanaan anggaran agar persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik dapat meningkat secara bertahap. Dengan upaya tersebut, diharapkan fasilitas pelabuhan dan dermaga rakyat dapat mendukung transportasi laut yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan pelayaran pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 54.587.696,- dan terealisasi Rp 54.010.206,- (98.9%) yaitu pada kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

8. Indikator Kinerja 8 : Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Sasaran 1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	48.84	48.84

Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi adalah perbandingan jumlah ASN yang terlatih terhadap jumlah ASN pada Dinas dengan target 100% dan realisasi 48,84%. Atau dirumuskan :

Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi
= $\frac{\text{Jumlah ASN terlatih yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100\%$
= $\frac{21}{43} \times 100\% = 48.84\%$
Jumlah ASN terlatih dan bersertifikat = 21 orang
Jumlah ASN = 43 orang

Berdasarkan hasil pengukuran indikator Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi, ditetapkan target sebesar 100 persen, yang berarti seluruh tenaga teknis sebanyak 43 orang PNS diharapkan telah memiliki sertifikasi sesuai dengan standar kompetensi. Namun demikian, realisasi yang dicapai baru sebesar 48 persen, atau sebanyak 21 orang dari total 43 orang tenaga teknis yang telah tersertifikasi.



Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 22 orang tenaga teknis (PNS) yang belum memiliki sertifikasi, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan sertifikasi, antara lain keterbatasan kuota dan jadwal sertifikasi, kesiapan peserta, serta dukungan anggaran dan fasilitas pendukung. Dalam periode 2025 anggaran untuk peningkatan kompetensi ASN tidak tersedia, sebagaimana tahu-tahun sebelumnya.

Belum optimalnya persentase tenaga teknis yang tersertifikasi berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan tugas teknis dan pemenuhan standar profesionalisme. Oleh karena itu, diperlukan upaya percepatan sertifikasi melalui perencanaan yang lebih terstruktur, peningkatan alokasi sumber daya, serta penguatan koordinasi dengan lembaga sertifikasi agar pada periode berikutnya seluruh tenaga teknis dapat tersertifikasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja dan realisasi Kinerja Tahun 2025 dan tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2024 dan 2025, secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan menunjukkan penurunan tipis pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, baik pada sasaran strategis, sasaran penunjang, maupun capaian kinerja secara keseluruhan. Meskipun demikian, kategori kinerja pada kedua tahun tersebut masih berada pada tingkat baik.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,46 dengan kategori Baik. Pada tahun 2025, capaian tersebut menurun menjadi 83,39%, atau mengalami penurunan sebesar 2,07 poin setara dengan 2,48%, sehingga kategori kinerja tetap BAIK. Namun penurunan capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian target strategis belum dapat dicapai secara optimal pada tahun 2025.

Sementara itu, rata-rata capaian kinerja sasaran penunjang pada tahun 2024 mencapai 100,87% dengan kategori Istimewa. Pada tahun 2025, capaian kinerja menurun menjadi 99,26%, atau turun sebesar 1,60 poin setara dengan 1,62%, dengan kategori kinerja berubah menjadi Baik. Meskipun mengalami penurunan, capaian ini masih menunjukkan bahwa sasaran penunjang secara umum tetap tercapai dengan baik dan mendukung pelaksanaan sasaran strategis.

Adapun rata-rata capaian kinerja secara keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 93,16% dengan kategori Baik. Pada tahun 2025, capaian tersebut sedikit menurun menjadi 91,33%, atau mengalami penurunan sebesar 1,84 poin setara dengan

2,01%. Namun demikian, kategori kinerja secara keseluruhan tetap berada pada level Baik, yang menunjukkan bahwa kinerja organisasi secara umum masih terjaga.

Secara keseluruhan, penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 relatif kecil dan tidak mengubah kategori kinerja organisasi. Penurunan ini menunjukkan perlunya penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta penyesuaian target dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia agar capaian kinerja pada periode berikutnya dapat meningkat dan kembali mendekati atau melampaui capaian tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024-2025 terhadap target kinerja 2024-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Target dan Realisasi Kinerja 2023-2024-2025

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			%	2025			Naik/ Turun (Poin)	%
		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
1	Rasio Konektivitas	0.84	0.74	88.10	0.85	0.74	87.06		0.86	0.73	84.88	-2.18	-2.56
2	Kinerja Lalu Lintas	49.37	27.42	55.54	53.65	30.40	56.66		59.37	31.98	53.86	-2.80	-5.19
3	Cakupan layanan angkutan umum layak	64.81	100.00	154.30	68.51	100.00	145.96	-5.71	74	100.00	135.14	-10.83	-8.01
4	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	62.50	50.00	80.00	75	50.00	66.67	-20.00	87.5	58.33	66.67	0.00	0.00
5	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	49.37	46.03	93.23	53.65	48.35	90.12	-3.46	59.3	59.20	99.83	9.72	9.73
6	Persentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	50.00	33.33	66.67	75	66.67	88.89	25.00	100	66.67	66.67	-22.22	-33.33
7	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	52.88	37.26	70.46	67.42	33.02	48.98	-43.87	85.93	33.02	38.43	-10.55	-27.45
8	Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	66.00	48.48	73.45	53	69.98	132.04	44.37	40	76.62	191.56	59.52	31.07
9	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	87.50	50.00	57.14	100	50.00	50.00	-14.29	100	20.00	20.00	-30.00	0.00
10	Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	60.00	48.84	81.40	80	48.84	61.05	-33.33	100	48.84	48.84	-12.21	-25.00
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS			82.03			85.46	4.02	0		83.39	-2.07	-2.48
	KATEGORI			BAIK			BAIK				BAK		
	RATA-RATA SASARAN PENUNJANG			100	98	98.85	100.87	0.86	99	98.27	99.26	-1.60	-1.62
	KATEGORI			BAIK			Istimewa				BAIK		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			91.01			93.16	2.31			91.33	-1.84	-2.01
	KATEGORI						Baik				Baik		

Analisis atas capaian kinerja tersebut dapat diuraikan berdasarkan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama :

1. Rasio Konektivitas

Perbandingan capaian kinerja Rasio Konektivitas Tahun 2024–2025:

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	0.85	0.74	87.06	0.86	0.73	84.88	-2.18

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Rasio Konektivitas pada tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024, meskipun target kinerja mengalami peningkatan.

Penurunan capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa peningkatan target belum diiringi dengan peningkatan realisasi Rasio Konektivitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam upaya peningkatan konektivitas, yang dapat disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, frekuensi layanan transportasi yang belum optimal, maupun faktor eksternal lainnya.

Secara keseluruhan, meskipun capaian Rasio Konektivitas pada tahun 2025 masih berada pada kategori cukup baik, diperlukan langkah evaluasi dan perbaikan yang lebih terfokus untuk meningkatkan realisasi kinerja agar selaras dengan target yang telah ditetapkan, khususnya melalui penguatan perencanaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.

Untuk konektivitas darat, realisasi kinerja tidak mengalami perubahan sepanjang periode 2022 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas darat relatif stabil, meskipun stabilitas tersebut juga mengindikasikan bahwa belum ada peningkatan signifikan yang terjadi selama empat tahun terakhir.

Capaian kinerja konektivitas transportasi laut hingga tahun 2024 menunjukkan kondisi yang relatif stabil, di mana realisasi kinerja tidak mengalami perubahan. Nilai capaian kinerja konektivitas laut tercatat sebesar 0,99. Pada tahun 2025, terjadi perubahan pada kondisi operasional angkutan penyeberangan. Jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi meningkat menjadi 14 lintasan, namun seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan menjadi 23 lintasan, sehingga capaian kinerja konektivitas laut mengalami penyesuaian.

2. Kinerja Lalu Lintas

Kinerja Lalu lintas diindikasikan dengan meningkatnya kinerja pelayanan public bidang transportasi.



Perbandingan capaian kinerja klnerja Lalu Lintas Tahun 2024–2025:

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	53.65	30.40	56.66	59.37	31.98	53.86	-2.80

Perbandingan capaian kinerja indikator lalu lintas Tahun 2024 dan Tahun 2025 dilakukan untuk menilai perkembangan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai dalam penyelenggaraan urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, secara realisasi nilai kinerja, Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,58 poin dibandingkan Tahun 2024. Namun demikian, apabila dilihat dari persentase capaian terhadap target, terjadi penurunan sebesar 2,81%, yang disebabkan oleh meningkatnya target kinerja yang belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan realisasi secara proporsional.

Secara umum, capaian kinerja lalu lintas menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan panjang jalan. Hal ini menjadi tantangan bagi penyelenggaraan transportasi darat di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian pertumbuhan kendaraan, serta peningkatan pemanfaatan angkutan umum guna menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di masa mendatang.

Pada tahun 2024, jumlah kendaraan mengalami peningkatan menjadi 60.524 unit, sementara panjang jalan mengalami penurunan menjadi 1.991,02 km.

Selanjutnya, pada tahun 2025 jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 63.670 unit, sedangkan panjang jalan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 1.991,02 km. Kondisi ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat kepadatan lalu lintas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta berpotensi menurunkan tingkat pelayanan jalan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan lalu lintas yang optimal.

Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertambahan panjang jalan menyebabkan meningkatnya rasio kendaraan terhadap panjang jalan, yang berdampak pada bertambahnya beban lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja lalu lintas Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan dibandingkan Tahun 2024, namun tetap memerlukan langkah-langkah peningkatan kinerja yang lebih terarah dan berkelanjutan agar target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal pada tahun-tahun berikutnya.



b. **Indikator Kinerja SASARAN**

1. Cakupan Layanan Angkutan Umum Layak

Capaian ini menunjukkan kinerja dinas perhubungan dalam memberi pelayanan angkutan umum melalui layanan trayek yaitu tersedia jaringan trayek sebanyak 66 trayek yang tersebar di 12 kecamatan.

Perbandingan capaian kinerja cakupan angkutan umum layak Tahun 2024–2025:

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	68.51	100	145.96	74	100	135.14	-10.83
Output	12 kec	12 kec	100%	12 kec	12 kec	100%	

Pada Tahun 2024, target cakupan angkutan umum layak ditetapkan sebesar 68,51, dengan realisasi capaian 100, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 145,96%. Hasil ini menunjukkan bahwa program pengembangan angkutan umum layak tidak hanya tercapai, tetapi melebihi target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program strategis dan penunjang, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas armada, perbaikan fasilitas transportasi, serta pengawasan keselamatan dan kenyamanan pengguna angkutan umum.

Pada Tahun 2025, target indikator meningkat menjadi 74, dengan realisasi capaian tetap 100, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 135,14%. Meskipun persentase capaian sedikit menurun (10.83 poin) dibandingkan Tahun 2024 karena peningkatan target, capaian tetap menunjukkan prestasi baik, menegaskan konsistensi Dinas Perhubungan dalam menyediakan trayek angkutan umum di 12 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Manggarai.

*Data Angkutan Umum dan trayek terlampir.

2. Indikator Kinerja 2 : Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar

Perbandingan capaian kinerja Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar Tahun 2024–2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	75	50	66.67	87.5	58.3	66.67	--
Output	12 Unit	6 unit	50%	12 unit	7 unit	58.3%	



Pada Tahun 2025, target indikator meningkat menjadi 87,5, dengan realisasi capaian 58,33, dan tingkat capaian tetap 66,67%. Meskipun realisasi nominal meningkat dibandingkan Tahun 2024 dengan realisasi 50% dari target 75%, persentase capaian terhadap target tidak mengalami perubahan karena peningkatan target belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan realisasi. Pada tahun 2025 hanya terdapat penambahan 1 unit peralatan PKB dari target 2 unit.

Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana uji KIR sehingga jumlah sarana prasarana uji KIR yang tersedia sampai dengan tahun 2022 sebanyak 6 (enam) unit. Pada tahun 2023 dan 2024, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana uji KIR guna menjaga optimalisasi fungsi dan kelaikan operasional peralatan yang telah tersedia. Selanjutnya, pada tahun 2025 dilakukan pengadaan 1 (satu) unit sarana uji KIR, sehingga total sarana uji KIR yang dimiliki menjadi 7 (tujuh) unit dari kebutuhan ideal sebanyak 12 (dua belas) unit.

*Data saran uji KIR terlampir

3. Indikator Kinerja 3 : Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik

Perbandingan capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik Tahun 2024–2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	53.65	48.35	90.12	59.30	59.20	99.83	9.72
Output	1452	702 unit	48.35%	1625	962 unit	59.20%	

Pada Tahun 2024, target indikator ditetapkan sebesar 53.65, dengan realisasi capaian sebesar 48.35, sehingga tingkat capaian terhadap target mencapai 90.12%. Pada Tahun 2025, target meningkat menjadi 59,30, dengan realisasi capaian sebesar 59,20, sehingga tingkat capaian tetap tinggi, yaitu 99,83%, yaitu dari 702 unit di tahun 2024 menjadi 962 unit perlengkapan jalan baik atau bertambah 260 unit. Peningkatan target yang diimbangi dengan realisasi hampir mencapai 100% menunjukkan konsistensi dan keberhasilan berkelanjutan Dinas Perhubungan dalam menjaga kualitas fasilitas jalan dan keselamatan.

Perbandingan capaian kedua tahun ini menunjukkan **tren positif** (naik 9.72) dalam pengelolaan sarana dan prasarana jalan, yang berdampak pada



keselamatan pengguna jalan, kelancaran mobilitas masyarakat, serta dukungan terhadap distribusi barang dan perekonomian lokal.

Ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai akan terus melakukan pemeliharaan rutin, penambahan fasilitas di titik-titik strategis, dan pengawasan berkala, sehingga kondisi perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan tetap dalam kondisi baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kondisi sampai dengan tahun 2023 jumlah total perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan yang sudah tersedia di Kabupaten Manggarai adalah 1434 unit yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Dari jumlah tersebut dalam kondisi baik adalah sebanyak 660 unit.

Tahun 2024 melalui kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota, terdapat penambahan jumlah total perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan sebanyak 29 unit sehingga menjadi 1452 unit.

Dari jumlah tersebut melalui kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan menambah jumlah dalam kondisi baik menjadi 702 unit atau bertambah 42 unit dari tahun 2023 (tahun 2023 : 660 unit).

Sehingga realisasi capaian indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik adalah 48,35 % dari target 53,65% naik 5,03% dari tahun 2023.

*Data Perlengkapan jalan terlampir

4. Indikator Kinerja 4 : Porsentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik

Perbandingan capaian kinerja Presentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	75	66.67	88.89	100	66.67	66.67	-22.22
Output	3 unit	2 unit	66.67	3 unit	2 unit	66.67	

Berdasarkan data kinerja yang tersedia, capaian realisasi pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan nilai yang sama, yaitu sebesar **66,67**. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan pada tingkat capaian kinerja yang dihasilkan.

Pada tahun 2024, dengan target sebesar 75, realisasi 66,67 menghasilkan persentase capaian sebesar 88,89%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, pada tahun 2025, target kinerja



mengalami peningkatan menjadi 100, namun realisasi tetap sebesar 66,67, sehingga persentase capaian menurun menjadi 66,67%.

Penurunan persentase capaian kinerja sebesar **22,22%** pada tahun 2025 bukan disebabkan oleh menurunnya realisasi, melainkan oleh peningkatan target yang belum diimbangi dengan peningkatan kinerja aktual. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan kinerja agar realisasi pada tahun berikutnya dapat menyesuaikan dengan target yang lebih tinggi, melalui penguatan perencanaan, optimalisasi sumber daya, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.

5. Indikator Kinerja 5 : Porsentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai

Perbandingan capaian kinerja Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai 2024-2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	67.42	33.02	48.98	85.93	66.67	33.02	-10.55
Output	5266.80m2	1739.10m2	33.02%	5266.80m2	1739.10m2	33.02%	

Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai adalah perbandingan luas kawasan parkir yang tertata terhadap luas kawasan yang digunakan sebagai lahan parkir. Capaian kinerja indikator ini adalah capaian kinerja untuk kawasan parkir yang ada dalam wilayah kota Ruteng dan satu lokasi di Kota Reo. Berdasarkan hasil perhitungan, luas seluruh kawasan parkir tahun 2023 adalah 4.667m2, dan tahun 2024 hingga 2025 menjadi 5.266,80m2. Sedangkan yang memiliki rambu parkir hanya seluas 1739,10m2.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator *Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai* pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 33,02 dari target 67,42, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 48,98%. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari target penataan kawasan parkir telah berhasil direalisasikan.

Pada tahun 2025, target indikator mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 85,93 sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan



penataan parkir. Namun demikian, realisasi yang dicapai masih sebesar 33,02, sehingga persentase capaian kinerja menurun menjadi 38,43%.

Secara umum, terjadi penurunan persentase capaian kinerja sebesar 10,55% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan capaian ini bukan disebabkan oleh menurunnya realisasi kinerja, melainkan oleh peningkatan target yang cukup tinggi yang belum diimbangi dengan peningkatan realisasi penataan kawasan parkir dan penyediaan fasilitas parkir yang memadai.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana parkir yang memenuhi standar, perlunya penataan ulang kawasan parkir di sejumlah lokasi prioritas, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program penataan parkir. Selain itu, meningkatnya kebutuhan ruang parkir seiring pertumbuhan volume kendaraan turut menjadi tantangan dalam pencapaian target.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penataan kawasan parkir telah dilaksanakan secara berkelanjutan, perlu adanya penguatan strategi dan percepatan pelaksanaan program agar capaian kinerja dapat meningkat dan selaras dengan target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

6. Indikator Kinerja 6 : Porsentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa

Perbandingan capaian kinerja Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa 2024-2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	53	69.98	132.04	40	76.62	191.56	59.52
Output	2702 m	1862 m		3850m	1900 m		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian indikator *Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa* pada tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar 69,98 dari target 53, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 132,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa kebutuhan penanganan ruas jalan rawan kemacetan melalui rekayasa lalu lintas telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 40. Namun demikian, realisasi yang dicapai meningkat menjadi 76,62, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 191,56%. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan signifikan dalam identifikasi dan penanganan ruas jalan rawan kemacetan yang memerlukan rekayasa lalu lintas.

Jika dibandingkan terjadinya peningkatan persentase capaian kinerja sebesar 59,52% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, mencerminkan semakin tingginya kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya penanganan kemacetan, seiring dengan meningkatnya volume lalu lintas dan aktivitas perkotaan. Selain itu, peningkatan capaian juga dipengaruhi oleh semakin optimalnya pemetaan ruas jalan rawan kemacetan serta penguatan perencanaan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Capaian kinerja yang melampaui target pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa indikator ini bersifat indikator kebutuhan, di mana semakin tinggi capaian mencerminkan semakin banyak ruas jalan yang memerlukan penanganan rekayasa lalu lintas. Oleh karena itu, hasil capaian ini menjadi dasar penting bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun prioritas program dan kegiatan rekayasa lalu lintas pada tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, Dinas Perhubungan akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas secara terintegrasi guna menekan tingkat kemacetan dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

7. Indikator Kinerja 7: Porsentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik

Perbandingan capaian kinerja Persentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan Dan Dermaga Rakyat Dalam Kondisi Baik 2024-2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
Realisasi	100	50	50	100	20	20	-30
Output	4 unit	2 unit	50%	5 unit	1 unit	20%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Persentase Fasilitas Pelabuhan Pengumpan dan Dermaga Rakyat dalam Kondisi Baik pada tahun 2024–2025, diketahui bahwa target yang ditetapkan pada kedua tahun tersebut adalah sebesar 100 persen. Namun demikian, capaian kinerja yang diperoleh belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 50 persen, sehingga persentase capaian kinerja berada pada angka 50 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa hanya setengah dari total fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat yang berada dalam kondisi baik. Kondisi



tersebut mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, maupun peningkatan kualitas fasilitas pelabuhan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 kinerja indikator ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Realisasi kinerja tercatat sebesar 20 persen, dengan tingkat capaian terhadap target hanya 20 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa kondisi fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat semakin menurun serta belum diimbangi dengan upaya perbaikan yang memadai.

Penurunan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi, serta adanya kerusakan fasilitas akibat usia bangunan dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluasi dan perbaikan yang komprehensif, termasuk penajaman perencanaan program, penguatan alokasi sumber daya, serta peningkatan pengawasan dan pemeliharaan secara berkelanjutan agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan.

8. Porsentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi

Perbandingan capaian kinerja Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi 2024-2025

Tahun	2024			2025			
Target	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Naik/Turun
10.							
Realisasi	80	48.84	61.05	100	48.84	48.84	-12.21
Output	43 org	21 org	48.48%	43 org	21 org	48.48%	

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator Persentase Tenaga Teknis Terlatih yang Tersertifikasi pada tahun 2024–2025, diketahui bahwa capaian kinerja tidak mengalami perubahan dari sisi jumlah tenaga teknis yang tersertifikasi. Dari total 43 orang PNS tenaga teknis, jumlah yang telah tersertifikasi tetap sebanyak 21 orang PNS.

Pada tahun 2024, dengan target sebesar 80 persen, realisasi kinerja mencapai 48,84 persen, atau setara dengan 21 orang PNS yang telah tersertifikasi. Capaian ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 61,05 persen terhadap target yang ditetapkan.



Selanjutnya, pada tahun 2025 target kinerja ditingkatkan menjadi 100 persen, namun realisasi kinerja tetap berada pada angka 48,84 persen, yaitu 21 orang PNS dari total 43 orang PNS. Kondisi ini menyebabkan persentase capaian kinerja menurun menjadi 48,84 persen, meskipun secara faktual jumlah tenaga teknis yang tersertifikasi tidak mengalami penurunan.

Dengan demikian, penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 lebih disebabkan oleh kenaikan target yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga teknis yang tersertifikasi, bukan karena berkurangnya tenaga teknis yang telah tersertifikasi. Hal ini mengindikasikan perlunya percepatan dan pemerataan program sertifikasi bagi sisa 22 orang PNS yang belum tersertifikasi, melalui perencanaan yang lebih terstruktur, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan koordinasi dengan lembaga sertifikasi, agar target kinerja pada periode selanjutnya dapat tercapai secara optimal.

Ringkasan capaian sasaran strategis Dinas Perhubungan 2025 perindikator dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Target Dan Realisasi Kinerja 2023-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			%	2025			Naik/ Turun (Poin)	%
		TARGET	REALISASI	CAPAIA	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		TARGET	REALISASI	%CAPAIAN		
1	Rasio Konektivitas	0.84	0.74	88.10	0.85	0.74	87.06		0.86	0.73	84.88	-2.18	-2.56
2	Kinerja Lalu Lintas	49.37	27.42	55.54	53.65	30.40	56.66		59.37	31.98	53.86	-2.80	-5.19
3	Cakupan layanan angkutan umum layak	64.81	100.00	154.30	68.51	100.00	145.96	-5.71	74	100.00	135.14	-10.83	-8.01
4	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	62.50	50.00	80.00	75	50.00	66.67	-20.00	87.5	58.33	66.67	0.00	0.00
5	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam	49.37	46.03	93.23	53.65	48.35	90.12	-3.46	59.3	59.20	99.83	9.72	9.73
6	Persentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	50.00	33.33	66.67	75	66.67	88.89	25.00	100	66.67	66.67	-22.22	-33.33
7	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki	52.88	37.26	70.46	67.42	33.02	48.98	-43.87	85.93	33.02	38.43	-10.55	-27.45
8	Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	66.00	48.48	73.45	53	69.98	132.04	44.37	40	76.62	191.56	59.52	31.07
9	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat	87.50	50.00	57.14	100	50.00	50.00	-14.29	100	0.00	0.00	-50.00	0.00
10	Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	60.00	48.84	81.40	80	48.84	61.05	-33.33	100	48.84	48.84	-12.21	-25.00
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRAT			82.03			85.46	4.02	0		80.89	-4.57	-5.65
	KATEGORI			BAIK			BAIK				BAK		
	RATA-RATA SASARAN PENUNJANG			100	98	98.85	100.87	0.86	99	98.27	99.26	-1.60	-1.62
	KATEGORI			BAIK			Istimewa				BAIK		
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			91.01			93.16	2.31			90.08	-3.09	-3.43
	KATEGORI						Baik				Baik		



C. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan RENSTRA 2021-2026

Sedangkan tingkat capaian kinerja terhadap target renstra Dinas Perhubungan dapat dilihat tabel berikut ini:



Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Dan Indikator Sasaran Strategis Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA		REALISASI		% CAPAIAN		ANGGARAN PROGRAM	
				KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	TARGET	REALISASI
Tujuan Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0.86		0.73		84.88			
		Kinerja Lalu Lintas	Angka	59.37		31.98		53.86			
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	493,596,000.00	100.00	112,206,946.00	135.14	22.73	112,864,436.00	112,206,946.00
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	1,052,035,830.00	58.33	156,541,500.00	66.67	14.88	160,420,000.00	156,541,500.00
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	2,022,052,100.00	59.20	13,300,000.00	99.83	0.66	13,300,000.00	13,300,000.00
		Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Persen	100	1,175,203,479.60	66.67	-	66.67	0.00	-	-
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	1,126,370,534.44	33.02	480,701,284.00	38.43	42.68	483,680,272.00	480,701,284.00
		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	168,696,500.00	76.62	19,920,000.00	191.56	11.81	20,250,000.00	19,920,000.00
		Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	106,341,124.28	20.00	54,010,206.00	20.00	50.79	54,587,696.00	54,010,206.00
		Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	22,022,000.00	48.84	-	48.84	0.00	-	-
	Rata-rata sasaran strategis				6,166,317,568.32		836,679,936.00	83.39	13.57	845,102,404.00	836,679,936.00
Sasaran Penunjnag	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah bidang perhubungan	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99.000	4,611,802,560.00	98.27	4,239,940,623.00	99.26	91.94	4,611,802,560.00	4,239,940,623.00
	Rata-rata sasaran strategis + Pendukung				10,778,120,128.32		5,076,620,559	91.33	47.10	5,456,904,964.00	5,076,620,559.00



Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, capaian kinerja Dinas Perhubungan mencapai 91.33%, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan sejalan dengan target yang ditetapkan dalam RENSTRA 2021-2026, meskipun tidak sepenuhnya dapat teralisasi. Sementara itu, capaian keuangan tercatat sebesar 47.10%, mencerminkan belum adanya konsistensi antara Rencana strategis dengan realisasi tahun 2025. Hal ini karena pembagian alokasi anggaran sesuai dengan kegiatan prioritas daerah sehingga Dinas Perhubungan tidak 100 % anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan di rencana strategis. Namun walaupun alokasi anggaran tidak sesuai kebutuhan, target program kegiatan Dinas Perhubungan masih bisa dilaksanakan.

D. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

KABUPATEN					NASIONAL				
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Rasio konektivitas	Rasio	0.86	0.73	84.88	Rasio konektivitas transportasi nasional	Rasio	0.82	0.695	84.76

Pada tahun 2025 realisasi rasio konektivitas menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan capaian nasional. Rasio konektivitas nasional tercatat 0.695% dengan tingkat capaian 84,76%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tantangan dalam peningkatan konektivitas masih dirasakan secara nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dan akan dilakukan

Capaian kinerja Dinas Perhubungan menunjukkan hasil relative baik, namun belum sepenuhnya mencapai seluruh target yang ditetapkan. Keberhasilan kinerja didorong oleh beberapa factor antara lain :

- a. Terlaksananya sebagian besar kegiatan sesuai rencana
- b. Meningkatnya koordinasi lintas sektor
- c. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur transportasi yang telah tersedia

Disisi lain, belum tercapainya beberapa target kinerja disebabkan oleh antara lain :



- a. Pertumbuhan kebutuhan transportasi, seperti pertumbuhan kendaraan yang tidak dimbangi pertumbuhan infrastruktur yang ada
- b. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan strategis
- c. Ketergantungan pada kebijakan dan pendanaan pusat

Sebagai Solusi alternatif yang telah dilakukan Dinas Perhubungan melakukan prioritas program, penyesuaian kegiatan, serta penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait.

Adapun Langkah yang akan dilakukan ke depan meliputi :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran

Peningkatan perencanaan dan penganggaran merupakan strategi penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang efektif dan berkelanjutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai berupaya meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan program dan kegiatan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat, kondisi geografis wilayah, serta data dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Dalam aspek penganggaran, strategi ini diarahkan pada penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan (money follows program). Pengalokasian anggaran dilakukan secara lebih fokus, prioritas, dan terukur, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan infrastruktur transportasi dan pelayanan publik di bidang perhubungan.

Selain itu, Dinas Perhubungan mendorong optimalisasi sumber pendanaan melalui sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, serta peningkatan kualitas usulan program agar dapat didukung melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia.

2. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur transportasi

Pemeliharaan rutin dan berkala terhadap infrastruktur transportasi menjadi fokus utama guna menjaga keberlanjutan fungsi prasarana yang ada. Strategi ini dilakukan melalui inventarisasi kondisi infrastruktur, penentuan skala prioritas pemeliharaan, serta pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien



3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, dan instansi terkait Dinas Perhubungan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, terutama untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Secara ringkas penyebab tercapainya dan tidak tercapainya target kinerja tahun 2025 berdasarkan indicator kinerja dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3. 5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Penyebab	Alternativ Solusi
Sasaran 1 Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	100.00	135.135	Jumlah layanan trayek sudah menjangkau 12 kecamatan dalam wilayah kabupaten Manggarai	Telah dilakukan survey untuk jalur pelayanan baru (trayek baru)
	Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	58.33	66.667	Tahun 2025 terdapat pengadaan 1 unit alat Uji KIR sehingga menambah jumlah alat uji menjadi 7 unit dari total kebutuhan 12 unit	Direncanakan penambahan peralatan Uji KIR Kendaraan Bermotor secara bertahap
	Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	59.20	99.831	Terlaksananya pekerjaan pemeliharaan rambu sehingga menambah fasilitas perlengkapan jalan kondisi baik	Tetap melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas keselamatan jalan dan pemasangan baru fasilitas keselamatan jalan
	Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	Persen	100	66.67	66.667	Tahun 2025 belum dialokasikan anggaran untuk pemeliharaan terminal	Pemeliharaan terminal yang sudah dibangun
	Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	33.02	38.427	Tahun 2025 tidak ada kegiatan pembangunan/pemeliharaan marka parkir	Disusun rencana untuk penyediaan fasilitas parkir
	Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	76.62	191.558	Semakin tingginya pertumbuhan kendaraan yang memanfaatkan jalan tidak diimbangi dengan ruas jalan yang cenderung stabil/tidak berubah, mentalitas pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya yang kurang tertib dalam bertransportasi	Diusulkan Penyediaan terminal dalam kota sehingga badan jalan tidak dijadikan tempat menaikn menurunkan penumpang, penataan parkir khusus dalam kota Ruteng, Sosialisasi/penegakan aturan dalam tertib berlalu lintas
	Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	0.00	0.000	Tahun 2025 tidak ada kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan hanya pensertifikatan tanah untuk pembangunan dermaga	Usulan pembangunan fasilitas pelabuhan ke kementerian
	Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	48.84	48.837	Tahun 2025 tidak ada kegiatan Blmtek/Diklat teknis bidang Perhubungan	Usulan kegiatan Blmtek/Diklat teknis bidang Perhubungan

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan sumberdaya yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai baik SDM maupun dukungan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan.

Seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan

didukung oleh pegawai Dinas Perhubungan. Pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai sebanyak 93 orang, yang terdiri atas 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 48 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan komposisi sebagai berikut:

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2025

No	Jabatan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang				3	3
4	Kepala Seksi			5		5
5	Kepala UPTD			1		1
6	Kasubag			3		3
7	Fungsional			2		2
8	Pelaksana		10	19		29
9	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)		42	6		
	Jumlah	0	52	36	5	93

Data PNS menurut Eselonering

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III A	1
3	Eselon III B	3
4	Eselon IV A	8
5	Eselon IV B	1
Total		14

Data ASN (PNS, CPNS dan PPPK) Fungsional

No	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Fungsional Umum	77
2	Fungsional Tertentu	2
Total		79

Data PNS Menurut Diklat Standar Kompetensi Bersertifikasi

No	Jenis Diklat	Jumlah
----	--------------	--------



1	Diklat Struktural	4
2	Diklat Teknis Fungsional	30
Total		34

Data ASN (PNS, CPNS dan PPPK) menurut Gender

No	Gender	Jumlah
	Laki – Laki	74
	Perempuan	19
Total		93

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	Pendidkan					Jumlah
		SMP	SMA/ S M K	D-III	S-1	S-2	
1	Kepala Dinas					1	1
2	Sekretaris				1		1
3	Kepala Bidang				3		3
4	Kepala Seksi				4	1	5
5	Kasubag				3		3
6	Kepala UPTD				1		1
7	Fungsional				2		3
8	Pelaksana	1	13	2	13		29
9	PPPK		41	2	5		
	Jumlah	1	54	4	32	2	93

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Program Dinas Perhubungan adalah :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
- (2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



(3) Program Pengelolaan Pelayaran

Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai telah menjalankan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. Program-program dimaksud terdiri dari dua (2) Program strategis bidang perhubungan dan 1 program pendukung urusan pemerintahan daerah. Realisasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 menunjukkan capaian kinerja 100% yaitu tiga program dan 14 kegiatan yang direncanakan, telah dilaksanakan seluruhnya. Secara ringkas dapat dilihat pada tabe 3.7

Tabel 3. 6 Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	REA
1	2	3		4	5	6	7	8
1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat			Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan				
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	1,1	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota	Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
				Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	17	29
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dalam Kondisi baik	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang dipelihara	17	13
		Persentase terminal sesuai standar/dalam kondisi baik	1,2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Tipe C			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas Utama dan Penunjang)	Tersedianya rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	1,3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terwujudnya penertiban, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 LAPORAN	12 LAPORAN
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	1,4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	200D OKUMEN	
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	6 UNIT	6 UNIT



No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET	REA
				Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 LAPORAN	1 LAPORAN
		Persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	1,5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Optimalisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 LAPORAN	12 LAPORAN
		Cakupan layanan angkutan umum layak	1,6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	12 LAPORAN	12 LAPORAN
			1,7	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya rencana umum jaringan trayek pedesaan Daerah Dalam/ Kota			
				Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/kota	Tersedianya Rumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 LAPORAN	12 LAPORAN
		Persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	2	Program Pengelolaan Pelayaran				
		Persen tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	2,1	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan penerbitan izi Usaha angkuta laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisilidan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 LAPORAN	12 LAPORAN

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Beberapa program dan kegiatan yang memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2025 antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program ini menunjukkan capaian yang relatif tinggi dengan rata-rata sasaran penunjang sebesar 99,26%. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan administratif dan pengelolaan internal yang efektif, termasuk perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan koordinasi internal yang baik juga memperkuat pelaksanaan program ini.

- Program Pengelolaan Pelayaran

Tahun 2025, meskipun tidak ada Pembangunan fisik, pelaksanaan pengelolaan pelayaran berfokus pada penyediaan sertifikat tanah untuk pembangunan dermaga.

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meskipun terdapat penurunan capaian pada sasaran strategis, beberapa kegiatan seperti pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan berlalu lintas, dan perbaikan prasarana telah memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan keselamatan dan ketertiban di jalan raya.

Faktor Penyebab Kegagalan atau Penurunan Capaian

Penurunan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 85,46% pada tahun 2024 menjadi 83,39% pada tahun 2025 menunjukkan adanya beberapa kendala, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi dan jumlah SDM di beberapa bidang teknis masih terbatas, sehingga menghambat optimalisasi pelaksanaan kegiatan, khususnya pada program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Penyesuaian anggaran yang terbatas menyebabkan beberapa kegiatan prioritas harus dikurangi atau ditunda, terutama yang terkait pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur perhubungan, yang berdampak langsung pada efektivitas layanan.

- Kendala Koordinasi dan Dukungan Stakeholder

Koordinasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai pihak terkait belum sepenuhnya optimal, sehingga implementasi kebijakan dan program terkadang kurang sinergis dan berdampak pada capaian kinerja.

- Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas dan prosedur keselamatan berkontribusi pada tantangan dalam peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

3). Kesimpulan dan Rekomendasi

Meskipun terdapat penurunan capaian pada beberapa indikator, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai

secara umum tetap berada pada kategori baik. Keberhasilan pada program pendukung internal dan pengelolaan pelayanan menjadi fondasi yang kuat untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di tahun berikutnya, perlu dilakukan:

- Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan penambahan tenaga ahli.
- Optimalisasi alokasi anggaran dengan fokus pada kegiatan prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dalam program keselamatan dan ketertiban lalu lintas.
- Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik.

H. Inovasi

Dalam upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi pelajar di wilayah Kabupaten Manggarai, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 melaksanakan inovasi **ZLAKO (Zona Selamat Sekolah)**. Inovasi ini merupakan pendekatan terpadu yang bertujuan menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, tertib, dan ramah bagi anak sekolah pada kawasan sekitar satuan pendidikan.

Inovasi ZLAKO dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas lalu lintas pada jam masuk dan pulang sekolah, yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan bagi pelajar. Melalui ZLAKO, Dinas Perhubungan melakukan penataan kawasan sekolah dengan penyediaan dan optimalisasi perlengkapan keselamatan jalan, seperti rambu peringatan sekolah, marka jalan, zebra cross, serta pengaturan kecepatan kendaraan di sekitar sekolah.

Selain aspek prasarana, inovasi ZLAKO juga merencanakan kegiatan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, guru, dan orang tua dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Inovasi ini dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi dengan pihak sekolah, kepolisian, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Dari sisi tata kelola, pelaksanaan inovasi ZLAKO dilakukan secara terencana dan berbasis data, dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan lalu lintas di sekitar sekolah. Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas inovasi serta sebagai dasar penyempurnaan pada tahun berikutnya. Penerapan inovasi ZLAKO pada Tahun 2025 memberikan dampak



positif terhadap peningkatan keselamatan pelajar dan ketertiban lalu lintas di kawasan sekolah. Inovasi ini juga berkontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai di bidang keselamatan transportasi serta menjadi salah satu bentuk komitmen instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan melaksanakan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis, yaitu *meningkatnya layanan perhubungan*. Pencapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui indikator rasio konektivitas dan kinerja lalu lintas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rasio konektivitas mencapai 0,73 dari target 0,86 atau sebesar 84,88 persen, sedangkan kinerja lalu lintas mencapai 31,98 dari target 59,37 atau sebesar 53,86 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan perhubungan telah berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek kinerja lalu lintas.

Untuk mendukung tujuan strategis tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan sasaran strategis *meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat*. Sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja utama. Cakupan layanan angkutan umum layak menunjukkan capaian sangat baik, yaitu sebesar 135,14 persen dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp782.669.730,00 dari pagu Rp790.514.708,00 atau sebesar 99,01 persen.

Indikator persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar mencapai 66,67 persen dari target 87,50 persen. Meskipun realisasi anggaran pada kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor mencapai 97,58 persen, capaian kinerja belum optimal karena masih terbatasnya sarana pendukung yang memenuhi standar secara menyeluruh.

Selanjutnya, indikator persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik menunjukkan capaian sebesar 99,83 persen dan didukung oleh realisasi anggaran kegiatan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang mencapai 100 persen. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta optimalnya pemanfaatan anggaran dalam mendukung keselamatan lalu lintas.



Pada indikator persentase terminal sesuai standar atau dalam kondisi baik, capaian kinerja sebesar 66,67 persen dengan realisasi anggaran kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ sebesar 99,47 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian terminal telah memenuhi standar, namun masih diperlukan peningkatan kualitas pada terminal lainnya.

Indikator persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas memadai mencapai 38,43 persen dari target 85,93 persen. Walaupun realisasi anggaran kegiatan perparkiran mencapai lebih dari 99 persen, capaian kinerja masih relatif rendah yang disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan lahan parkir dan belum optimalnya penataan fasilitas parkir di beberapa lokasi.

Sementara itu, indikator persentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa menunjukkan capaian sangat tinggi, yaitu sebesar 191,56 persen dari target. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didukung oleh realisasi anggaran sebesar 98,37 persen.

Untuk sektor transportasi perairan, persentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik mencapai 20 persen dari target 100 persen. Program Pengelolaan Pelayaran terealisasi sebesar 98,94 persen, namun capaian kinerja masih terbatas karena kegiatan pembangunan dan peningkatan fasilitas pelabuhan dilakukan secara bertahap.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 83,39 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp836.679.936,00 dari pagu Rp845.102.404,00 atau sebesar 99,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pada sasaran strategis telah berjalan sangat baik dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.

Selain sasaran strategis, Dinas Perhubungan juga melaksanakan sasaran penunjang, yaitu *meningkatkan kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan*. Sasaran ini mencapai kinerja sebesar 99,26 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.239.940.623,00 dari pagu Rp4.611.802.560,00 atau sebesar 91,94 persen.

Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 mencapai 91,33 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.076.620.559,00 dari total pagu Rp5.456.904.964,00 atau sebesar 93,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 secara umum telah berjalan efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan peningkatan pelayanan perhubungan kepada masyarakat.



Rekapitulasi realisasi anggaran terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan
Tahun 2025 seperti paba tabel berikut :





Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran terhadap Sasaran Strategis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
				KINERJA	KINERJA	CAPAIAN			KEUANGAN	KEU
Tujuan Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0.86	0.73	84.88				
		Kinerja Lalu Lintas	Angka	59.37	31.98	53.86				
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat						Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	790,514,708.00	782,669,730.00	99.01
		Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	100.00	135.14	Kegiatan : Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62
							Sub kegiatan : Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	58.33	66.67	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,420,000.00	156,541,500.00	97.58
							Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,900,000.00	17,883,000.00	99.91
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137,900,000.00	134,078,500.00	97.23
							Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,620,000.00	4,580,000.00	99.13



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
				KINERJA	KINERJA	CAPAIAN			KEUANGAN	KEU
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	59.20	99.83	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	13,300,000.00	13,300,000.00	100.00
							Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00
							Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00
		Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Persen	100	66.67	66.67	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47
							Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	33.02	38.43		483,680,272.00	480,701,284.00	99.38
							Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40
							Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97
							Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97
		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	76.62	191.56	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,250,000.00	19,920,000.00	98.37
							Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	12,000,000.00	11,860,000.00	98.83



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
				KINERJA	KINERJA	CAPAIAN			KEUANGAN	KEU
							Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,250,000.00	8,060,000.00	97.70
		Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	20.00	20.00	Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696.00	54,010,206.00	98.94
							Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20
							Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20
							Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96
							Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96
		Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	48.84	48.84		-	-	0.00
	Rata-rata sasaran strategis					83.39		845,102,404.00	836,679,936.00	99.00
Sasaran Penunjang	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah bidang perhubungan	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99	98.27	99.26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,611,802,560.00	4,239,940,623.00	91.94
	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN PENUNJANG					99.26		4,611,802,560.00	4,239,940,623.00	91.94



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
				KINERJA	KINERJA	CAPAIAN			KEUANGAN	KEU
	RATA-RATA CAPAIAN TAHUN 2025					91.33		5,456,904,964.00	5,076,620,559.00	93.03



1. Target dan Realisasi Belanja

Tabel 3. 8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA DAERAH	5,456,904,964.00	5,082,047,559.00	93.03
A	BELANJA OPERASI	5,352,204,964.00	4,978,102,059.00	92.91
1	Belanja Pegawai	4,217,443,372.00	3,856,346,102.00	91.44
2	Belanja Barang dan Jasa	1,134,761,592.00	1,116,328,957.00	98.38
B	BELANJA MODAL	104,700,000.00	103,945,500.00	99.28
1	Peralatan dan Mesin	94,700,000.00	93,945,500.00	99.20
2	Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mengelola Belanja Daerah sebesar Rp5.456.904.964,00, dengan realisasi mencapai Rp5.076.620.559,00 atau 93,03% dari total anggaran. Capaian ini menunjukkan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan, baik di bidang operasional maupun belanja modal.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi sebesar Rp5.352.204.964,00 terealisasi Rp4.972.675.059,00 atau 92,91%. Rinciannya:

- Belanja Pegawai terealisasi Rp3.856.346.102,00 (91,44%), mencerminkan pengelolaan SDM yang tepat sasaran dalam mendukung kinerja organisasi.
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp1.116.328.957,00 (98,38%), menunjukkan efisiensi tinggi dalam pemenuhan kebutuhan operasional, peralatan kerja, dan penyediaan jasa pendukung kegiatan dinas.

2. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp104.700.000,00 terealisasi Rp103.945.500,00 (99,28%). Rinciannya:

- Peralatan dan Mesin terealisasi Rp93.945.500,00 (99,20%), digunakan untuk mendukung operasional lapangan dan pelayanan publik
- Gedung dan Bangunan terealisasi Rp10.000.000,00 (100%), menandakan pengelolaan investasi fisik yang tepat waktu dan sesuai perencanaan.



Berdasarkan table diatas total penyerapan anggaran dinas sebesar 98,95%, dan yang tidak terealisasi sebesar 6,96% atau sebesar Rp380.284.405,-.

Penyerapan anggaran terbesar adalah pada program penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan diikuti program pengelolaan pelayanan pelayaran, dan terakhir adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan 2024

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai mengelola Belanja Daerah sebesar Rp5.456.904.964,00, dengan realisasi mencapai Rp5.076.620.559,00 atau 93,03% dari anggaran. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp5.218.232.192,10, terdapat penurunan sebesar Rp141.611.633,10 atau -2,79%, .

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2025 sebesar Rp5.352.204.964,00 terealisasi Rp4.972.675.059,00 (92,91%), meningkat 8,08% dibanding realisasi 2024 sebesar Rp4.571.094.165,00. Rincian:

- Belanja Pegawai terealisasi Rp3.856.346.102,00 (91,44%), meningkat signifikan 22,75% dibanding realisasi 2024 sebesar Rp2.979.105.777,00, mencerminkan penguatan pengelolaan SDM dan peningkatan kapasitas aparatur dalam mendukung kinerja instansi.
- Belanja Barang dan Jasa terealisasi Rp1.116.328.957,00 (98,38%), menurun 42,6% dibanding realisasi 2024 (Rp1.591.988.388,00), yang dipengaruhi oleh efisiensi pengadaan barang dan jasa serta penyesuaian kebutuhan operasional sesuai program prioritas.

2. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp104.700.000,00 terealisasi Rp103.945.500,00 (99,28%), menurun drastis dibanding realisasi 2024 sebesar Rp647.138.027,10 (-523%). Rinciannya:

- Peralatan dan Mesin terealisasi Rp93.945.500,00 (99,20%), menurun dibanding realisasi 2024 (Rp545.516.027,10), karena tahun 2025 fokus pada pengadaan peralatan-peralatan kerja.
- Gedung dan Bangunan terealisasi Rp10.000.000,00 (100%), menurun dibanding realisasi 2024 (Rp101.622.000,00), menandakan tidak adanya proyek pembangunan baru pada tahun berjalan.



Analisis dan Tindak Lanjut

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Tahun 2025 cukup tinggi (93,03%) dan efektif, meskipun terjadi penurunan total belanja dibanding tahun 2024 (-2,79%). Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi belanja modal dan efisiensi belanja barang dan jasa, sementara belanja pegawai dan belanja operasi menunjukkan peningkatan signifikan.

Tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

1. Optimalisasi perencanaan belanja barang/jasa agar sesuai kebutuhan program prioritas, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
2. Pemeliharaan dan pengelolaan belanja modal secara efisien, dengan fokus pada peralatan dan fasilitas yang sudah ada.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala untuk memastikan realisasi anggaran sesuai target dan mendukung pencapaian kinerja.
4. Koordinasi antar bidang untuk meningkatkan efektivitas belanja operasi, khususnya dalam mendukung keselamatan transportasi, pelayanan publik, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi.

Dengan langkah-langkah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai berkomitmen untuk mempertahankan disiplin anggaran, meningkatkan efisiensi, serta mendukung pencapaian sasaran kinerja instansi di tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi anggaran 2025 dan 2024 seperti terlihat dalam table berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
	BELANJA DAERAH	5,456,904,964.00	5,076,620,559.00	93.03	5,218,232,192.10	- 141,611,633.10	-2.79
A	BELANJA OPERASI	5,352,204,964.00	4,972,675,059.00	92.91	4,571,094,165.00	401,580,894.00	8.076
1	Belanja Pegawai	4,217,443,372.00	3,856,346,102.00	91.44	2,979,105,777.00	877,240,325.00	22.75
2	Belanja Barang dan Jasa	1,134,761,592.00	1,116,328,957.00	98.38	1,591,988,388.00	- 475,659,431.00	-42.6
B	BELANJA MODAL	104,700,000.00	103,945,500.00	99.28	647,138,027.10	- 543,192,527.10	-523
1	Peralatan dan Mesin	94,700,000.00	93,945,500.00	99.20	545,516,027.10	- 451,570,527.10	-481
2	Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	101,622,000.00	- 91,622,000.00	-916



Berikut secara rinci target dan realisasi anggaran belanja menurut sasaran program/kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan berdasarkan Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan	YANG TIAK TERALISASI
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	790,514,708.00	782,669,730.00	99.01	7,844,978.00
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62	90,000.00
	1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten /Kota	6,530,000.00	6,440,000.00	98.62	90,000.00
	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	160,420,000.00	156,541,500.00	97.58	3,878,500.00
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17,900,000.00	17,883,000.00	99.91	17,000.00
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	137,900,000.00	134,078,500.00	97.23	3,821,500.00
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	4. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4,620,000.00	4,580,000.00	99.13	40,000.00
	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40	2,853,988.00
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	477,515,272.00	474,661,284.00	99.40	2,853,988.00
	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97	125,000.00
	1. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	6,165,000.00	6,040,000.00	97.97	125,000.00
	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	20,250,000.00	19,920,000.00	98.37	330,000.00



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan	YANG TIAK TERALISASI
	1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota	12,000,000.00	11,860,000.00	98.83	140,000.00
	2. Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8,250,000.00	8,060,000.00	97.70	190,000.00
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	13,300,000.00	13,300,000.00	100.00	0.00
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	9,400,000.00	9,400,000.00	100.00	0.00
	2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3,900,000.00	3,900,000.00	100.00	0.00
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			#DIV/0!	0.00
	1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			#DIV/0!	0.00
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				
	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47	567,490.00
	1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	106,334,436.00	105,766,946.00	99.47	567,490.00
	Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696.00	54,010,206.00	98.9	577,490.00

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan	YANG TIAK TERALISASI
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20	567,490.00
	1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelak-sanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	31,502,696.00	30,935,206.00	98.20	567,490.00
	Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96	10,000.00
	1. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	23,085,000.00	23,075,000.00	99.96	10,000.00
		845,102,404.00	836,679,936.00	99.00	8,422,468.00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,611,802,560.00	4,239,940,623.00	91.94	371,861,937.00
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153,166,688.00	150,234,198.00	98.09	2,932,490.00
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97,158,088.00	96,490,598.00	99.31	667,490.00
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	613,600.00	613,600.00	100.00	0.00
	3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00
	4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00
	5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	700,000.00	700,000.00	100.00	0.00
	6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	800,000.00	400,000.00	50.00	400,000.00



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan	YANG TIAK TERALISASI
	7 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52,495,000.00	50,630,000.00	96.45	1,865,000.00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,246,893,372.00	3,882,796,102.00	91.43	364,097,270.00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,217,443,372.00	3,856,346,102.00	91.44	361,097,270.00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,450,000.00	26,450,000.00	89.81	3,000,000.00
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	119,142,500.00	118,999,300.00	99.88	143,200.00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	810,000.00	810,000.00	100.00	0.00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,446,000.00	80,437,000.00	99.99	9,000.00
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,800,000.00	22,725,000.00	99.67	75,000.00
	4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,026,500.00	7,967,300.00	99.26	59,200.00
	5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	7,060,000.00	7,060,000.00	100.00	0.00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24,900,000.00	22,864,081.00	91.82	2,035,919.00
	1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
	2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,900,000.00	21,864,081.00	91.48	2,035,919.00
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67,700,000.00	65,046,942.00	96.08	2,653,058.00
	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54,700,000.00	52,646,942.00	96.25	2,053,058.00
	2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,100,000.00	1,500,000.00	71.43	600,000.00



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	% Penyerapan	YANG TIAK TERALISASI
	3 Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,900,000.00	10,900,000.00	100.00	0.00
TOTAL REALISASI PROGRAM (3 PROGRAM)		5,456,904,964.00	5,076,620,559.00	93.03	380,284,405.00



2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan RENSTRA 2021-2026

Capaian Kinerja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut



LAKIP DINAS PEHUBUNGAN TAHUN 2025



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA		REALISASI		% CAPAIAN	
				KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
Tujuan Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan	Rasio Konektivitas	Angka	0.86		0.73		84.88	
		Kinerja Lalu Lintas	Angka	59.37		31.98		53.86	
Sasaran Strategis	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Cakupan layanan angkutan umum layak	Persen	74	6,530,000.00	100.00	6,440,000.00	135.14	98.62
		Persentase sarana dan prasarana uji KIR sesuai standar	Persen	87.5	160,420,000.00	58.33	156,541,500.00	66.67	97.58
		Persentase perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	Persen	59.3	13,300,000.00	59.20	13,300,000.00	99.83	100.00
		Presentase terminal sesuai standar/ dalam kondisi baik	Persen	100	106,334,436.00	66.67	105,766,946.00	66.67	99.47
		Persentase kawasan parkir yang tertata dengan baik dan memiliki fasilitas parkir yang memadai	Persen	85.93	483,680,272.00	33.02	480,701,284.00	38.43	99.38
		Presentase ruas jalan rawan kemacetan yang perlu direkayasa	Persen	40	20,250,000.00	76.62	19,920,000.00	191.56	98.37
		Presentase fasilitas pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat dalam kondisi baik	Persen	100	54,587,696.00	20.00	54,010,206.00	20.00	98.94
		Persentase tenaga teknis terlatih yang tersertifikasi	Persen	100	-	48.84	-	48.84	#DIV/0!
	Rata-rata sasaran strategis				845,102,404.00		836,679,936.00	83.39	99.00



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA		REALISASI		% CAPAIAN	
				KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN
Sasaran Penunjnag	Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintah bidang perhubungan	Presentase urusan rutin pemerintah yang terpenuhi sesuai standar	Persen	99.000	4,611,802,560.00	98.27	4,239,940,623.00	99.26	91.94
	Rata-rata sasaran strategis + Pendukung				5,456,904,964.00		5,076,620,559	91.33	93.03



B. Pendapatan

Salah satu fungsi utama Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai adalah mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor perhubungan, khususnya melalui penerimaan retribusi daerah. Sumber PAD Dinas Perhubungan adalah retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, retribusi jasa usaha yaitu retribusi pelayanan kepelabuhanan, dengan target dan realisasi tahun 2025 seperti pada tabel berikut :

U R A I A N	JUMLAH ANGGARAN	Jumlah Anggaran Yang Terealisasi (Rp)	%Anggaran Terealisasi	Sisa Anggaran yang belum terealisasi (Rp)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375,593,300	264,566,000	70.44	111,027,300
Perda Nomor 06 Tahun 2023				
Retribusi Pelayanan kepelabuhanan	14,150,475	5,320,952	37.60	8,829,523
Perda Nomor 06 Tahun 2023				
TOTAL	389,743,775	269,886,952	69.25	119,856,823

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 bersumber dari dua jenis retribusi, yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, yang pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp375.593.300, dengan realisasi sebesar Rp264.566.000 atau 70,44% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp111.027.300. Capaian ini menunjukkan bahwa retribusi parkir masih menjadi kontributor utama PAD Dinas Perhubungan, meskipun realisasinya belum mencapai target secara optimal.

Sementara itu, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditargetkan sebesar Rp14.150.475, dengan realisasi sebesar Rp5.320.952 atau 37,60% dari target. Adapun sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp8.829.523. Rendahnya realisasi retribusi kepelabuhanan dipengaruhi oleh terbatasnya aktivitas pelayanan serta belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi pada sektor tersebut.

Secara keseluruhan, total target PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 sebesar Rp389.743.775, dengan realisasi sebesar Rp269.886.952 atau 69,25%, sehingga masih terdapat sisa PAD yang belum



terrealisasi sebesar Rp119.856.823. Capaian ini menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemungutan PAD melalui penguatan pengawasan, penataan objek retribusi, serta optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis Kendala dan Tindak Lanjut PAD

Analisis Kendala

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 yang terealisasi sebesar 69,25% dipengaruhi oleh beberapa kendala utama. Pada sektor Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kendala yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kesadaran dan kepatuhan pengguna jasa parkir terhadap kewajiban pembayaran retribusi, belum optimalnya pengawasan di lapangan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemungutan retribusi.

Sementara itu, pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, rendahnya realisasi dipengaruhi oleh terbatasnya aktivitas pelayanan kepelabuhanan, frekuensi operasional yang belum stabil, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi retribusi sesuai ketentuan Peraturan Daerah. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan operasional turut memengaruhi efektivitas pemungutan PAD di sektor perhubungan.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya meningkatkan capaian PAD pada tahun berikutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai akan melakukan sejumlah tindak lanjut, antara lain meningkatkan pengawasan dan penertiban pemungutan retribusi parkir di lapangan, serta melakukan penataan kembali lokasi dan sistem pelayanan parkir agar lebih tertib dan transparan.

Pada sektor kepelabuhanan, tindak lanjut dilakukan melalui optimalisasi pelayanan dan pengawasan operasional, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, serta penyesuaian mekanisme pemungutan retribusi sesuai dengan kondisi pelayanan yang ada. Selain itu, Dinas Perhubungan akan memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis potensi riil serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pemungutan PAD sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Perbandingan Capaian PAD Tahun 2024 dan 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Tahun 2025 mencapai Rp269.886.952 atau 69,25% dari target sebesar Rp389.743.775. Jika dibandingkan dengan capaian PAD Tahun 2024, yang



terrealisasi sebesar Rp290.076.420 atau 74,43% dari target yang sama, terlihat adanya penurunan capaian sebesar 5,18 poin persentase.

Perincian capaian menurut jenis retribusi menunjukkan tren yang serupa:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - Tahun 2024: Target Rp375.593.300, realisasi Rp284.398.000 (75,73%)
 - Tahun 2025: Target Rp375.593.300, realisasi Rp264.566.000 (70,44%)

Capaian retribusi parkir mengalami penurunan sebesar 5,29 poin persentase, yang dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan pembayaran, prasarana parkir yang belum optimal serta keterbatasan pengawasan.
2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - Tahun 2024: Target Rp14.150.475, realisasi Rp5.678.420 (40,13%)
 - Tahun 2025: Target Rp14.150.475, realisasi Rp5.320.952 (37,60%)

Capaian retribusi kepelabuhanan menurun 2,53 poin persentase, disebabkan oleh terbatasnya aktivitas kepelabuhanan, frekuensi operasional yang fluktuatif, serta pengelolaan retribusi yang belum optimal.

Secara keseluruhan, total PAD tahun 2025 mengalami penurunan capaian dibanding tahun sebelumnya, yaitu 74,43% (2024) → 69,25% (2025). Penurunan ini menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PAD, melalui penguatan pengawasan, penataan objek retribusi, optimalisasi pelayanan, serta edukasi kepatuhan bagi pengguna jasa.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk:

- Memperkuat mekanisme pengawasan dan penertiban retribusi parkir;
- Mengoptimalkan pelayanan kepelabuhanan dan potensi retribusi yang ada;
- Menyusun strategi peningkatan PAD berbasis data dan evaluasi capaian tahunan;
- Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi retribusi untuk mendorong pencapaian target di tahun berikutnya.

No	Jenis Retribusi	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	% Capaian 2024	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	% Capaian 2025	Selisih % Capaian (2025-2024)
1	Retribusi Jasa Umum	375.593.300	284.398.000	75,73%	375.593.300	264.566.000	70,44%	-5,29%
1.1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	375.593.300	284.398.000	75,73%	375.593.300	264.566.000	70,44%	-5,29%
2	Retribusi Jasa Usaha	14.150.475	5.678.420	40,13%	14.150.475	5.320.952	37,60%	-2,53%
2.1	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	14.150.475	5.678.420	40,13%	14.150.475	5.320.952	37,60%	-2,53%
TOTAL		389.743.775	290.076.420	74,43%	389.743.775	269.886.952	69,25%	-5,18%



3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Tabel 3. 10 Ringkasan Realisasi Menurut Program

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	Program Penyelenggaraan Lalulintas Angkutan Jalan	790,514,708.00	782,669,730.00	99.01
		Program Pengelolaan Pelayaran	54,587,696.00	54,010,206.00	98.94
	Jumlah Anggaran Program Strategis		845,102,404.00	836,679,936.00	99.00
	Rata-Rata Capaian Sasaran Srategis Tahun 2025 (Form Pengukuran Kinerja Tahun 2025)				83.39
2	Meningkatnya penyelengga penunjang urusan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	4,611,802,560.00	4,239,940,623.00	91.94
	Jumlah Anggaran Program Strategis		5,456,904,964.00	5,076,620,559.00	93.03
	Rata-Rata Capaian Sasaran Penunjang Tahun 2025 (Form Pengukuran Kinerja Tahun 2025)				99.26
Prosentase Realiasi Anggaran Program Strategis + Program Pendukung (3 Program)					93.03
Rata-Rata Capaian Sasaran (Form Pengukuran Kinerja Tahun 2025)					91.33
Tingkat Efektivitas Anggaran Terhadap Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis					-1.70

Efektivitas penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 diukur dengan membandingkan persentase realisasi anggaran program strategis dan program pendukung terhadap rata-rata capaian sasaran. Total realisasi anggaran mencapai 93,03 persen, yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Program Pengelolaan Pelayaran dengan realisasi sebesar 99,00 persen, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar 91,94 persen. Sementara itu, rata-rata capaian sasaran tahun 2025 mencapai 91,33 persen, dengan capaian sasaran strategis sebesar 83,39 persen dan sasaran penunjang



sebesar 99,26 persen. Selisih antara persentase realisasi anggaran dan rata-rata capaian sasaran sebesar -1,70 menunjukkan bahwa secara umum penggunaan anggaran telah efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas pada program strategis agar keselarasan antara serapan anggaran dan capaian sasaran dapat lebih optimal pada tahun berikutnya.

Ringkasan tingkat fisiensi penganggaran Dinas perhubungan Tahun 2025 seperti table berikut :

Tabel 3. 11 Tingkat Efisiensi Penganggaran Tahun 2025

No	Sasaran	% Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	Efektif/Tidak Efektif	% Capaian Keuangan	Efisien/Tidak Efisien	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat	83.39	Tidak Efektif	99.00	Tidak efisien	-15.61
2	Meningkatnya Kualitas Penunjang urusan Pemerintah bidang perhubungan	99.26	Efektif	91.94	Efisien	7.33
	Jumlah Sasaran Strategis Dan Pendukung	91.33		93.03		- 1.70



BAB IV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 91,33%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis dan pendukung telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dari dua sasaran kinerja yang diukur, sasaran *Meningkatnya kualitas penunjang urusan pemerintahan bidang perhubungan* menunjukkan kinerja efektif dan efisien, dengan capaian kinerja sebesar 99,26% serta tingkat efisiensi sebesar 7,33. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran ini telah dikelola secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien.

Namun demikian, sasaran *Meningkatnya layanan perhubungan guna mendukung perekonomian masyarakat* menunjukkan kinerja yang belum efektif dan belum efisien. Meskipun realisasi anggaran mencapai 99,00%, capaian kinerja baru mencapai 83,39%, sehingga berdampak pada tingkat efisiensi yang negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pencapaian kinerja, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, capaian keuangan rata-rata sebesar 93,03% dengan tingkat efisiensi total -1,70 menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai masih perlu meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran agar keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi keuangan dapat tercapai secara lebih optimal.

5.2 Saran

Sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai pada tahun-tahun mendatang, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi serta kerjasama dan koordinasi dengan lembaga swasta khususnya



- pengelola angkutan dan forum lalu lintas;
2. Memberi perhatian dalam merumuskan rencana anggaran agar memperhatikan program/kegiatan yang mendukung IKU Kepala Daerah maupun IKU Dinas
 3. Mengalokasikan anggaran yang cukup dengan tetap memperhatikan skala prioritas;
 4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana serta permasalahan dapat diidentifikasi sejak dini.
 5. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, guna mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara profesional dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai wujud komitmen dalam penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai di masa yang akan datang.

Ruteng, 15 Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Manggarai



Sahadoen Silvester Zaldy,ST,MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19671231 199903 1 053

